

**OPTIMALISASI PERTUMBUHAN EKONOMI TINJAUAN
PENDAPATAN MENURUT PAHAM NEO-LIBERAL
(Kajian dalam Perspektif Islam)**

S K R I P S I

Oleh

**AHMAD SYUJA'
NIM: 02220058**



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG**

2007

**OPTIMALISASI PERTUMBUHAN EKONOMI TINJAUAN
PENDAPATAN MENURUT PAHAM NEO-LIBERAL
(Kajian dalam Perspektif Islam)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE)**

Oleh

**AHMAD SYUJA'
NIM: 02220058**



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2007**

LEMBAR PERSETUJUAN

**OPTIMALISASI PERTUMBUHAN EKONOMI TINJAUAN
PENDAPATAN MENURUT PAHAM NEO-LIBERAL
(Kajian dalam Perspektif Islam)**

SKRIPSI

Oleh

AHMAD SYUJA'
NIM: 02220058

Telah disetujui 17 Maret 2007

Dosen Pembimbing

UMROTUL KHASANAH, S.AG., M.SI

NIP. 150 287 782

Mengetahui :

D e k a n

DRS. H. A. MUHTADI RIDWAN, M.A.

NIP. 150 231 828

LEMBAR PENGESAHAN

OPTIMALISASI PERTUMBUHAN EKONOMI TINJAUAN PENDAPATAN MENURUT PAHAM NEO-LIBERAL (Kajian dalam Perspektif Islam)

SKRIPSI

Oleh

AHMAD SYUJA'
NIM: 02220058

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 30 Maret 2007

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua <u>Drs. Nur Asnawi, MA.</u> NIP. 150 295 491	()
2. Sekretaris / Pembimbing <u>Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si</u> NIP. 150 287 782	()
3. Penguji Utama <u>DR. Salim Al-Idrus, MM., M.Ag.</u> NIP. 150 284 768	()

Disahkan Oleh :

D e k a n

DRS. H. A. MUHTADI RIDWAN, MA.

NIP. 150 231 828



Persembahan

Karya sangat sederhana ini ku persembahkan untuk:

1. Ayahanda dan Ibunda,

yang selalu memberi semangat dan inspirasi kepada penulis;

dan untuk keluargaku tercinta

2. Saudara Perempuanaku, Kakak Ipar; serta Paman-Paman, Bibi-Bibiku dan Sepupu-Sepupuku;

atas segala perhatian dan dorongan yang kuat hingga terselesaikannya skripsi ini

3. Kawan-kawan seperjuanganku di JMM Komisariat "Nihilis"

Yang selalu memberikan ruang diskusi untuk penulis terimakasih kebersamaan kalian!!

MOTTO

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ
يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"

(QS.13 : 11)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan yang menguasai jagad raya yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmat yang tiada henti-hentinya kepada makhluk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Sholawat dan salam semoga tetap sampai kepada Sang revolusioner dunia Muhammad SAW., beserta seluruh sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi yang berjudul *“Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Tinjauan Pendapatan Menurut Paham Neoliberal (Kajian dalam Perspektif Islam)”* ini sebenarnya berangkat dari keprihatinan penulis atas krisis yang melanda Indonesia yang mengakibatkan hancurnya perekonomian negara Indonesia sekaligus telah menciptakan jurang antara yang kaya dan yang miskin semakin menganga karena penyelesaian krisis yang dialami Indonesia ini telah mengambil jalan ideologi neoliberal dengan liberalisasi ekonomi dan turunannya yaitu privatisasi, deregulasi dan pemotongan subsidi. Menurut penulis kebijakan-kebijakan ini semakin membuat perekonomian negara Indonesia semakin parah.

Oleh karena itu, skripsi ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi yang lebih luas bagi para akedimisi dan mahasiswa lain yang berminat mengkaji tentang ideologi neoliberal ini.

Selanjutnya, skripsi yang sederhana ini tidak akan pernah sampai terselesaikan tanpa bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sangat besar kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta semua keluarga yang tulus memberikan dengan ikhlas baik waktu, tenaga, dan pikirannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini sampai akhir.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang.
3. Bapak Drs. H. A. Muhtadi Ridwan, M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang, yang memberikan dorongan agar skripsi ini diselesaikan dengan serius.
4. Ibu Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaganya dalam membimbing penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis sampai dapat menyelesaikan studi ini.
6. Kawan-kawan seperjuanganku di IMM terimakasih atas kebersamaan kalian.

7. Kepada seseorang yang selalu memberikan motivasi agar skripsi ini dapat diselesaikan
8. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang terus memberikan motivasi agar skripsi ini diselesaikan

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan balasan yang setimpal atas semua amal dan jasa mereka yang sudah banyak berkorban baik waktu, pikiran maupun tenaganya demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini berguna bagi pihak-pihak yang menginginkan perubahan sosial kemasyarakatan yang lebih baik. Apa yang tertuang dan terkandung dari dalam skripsi ini tidak akan pernah terlepas dari kelemahan dan kekurangan, karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca.

Malang, April 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAKSI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Batasan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
F. Definisi Operasional	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Hakekat Pertumbuhan Ekonomi,	16
B. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi,	17
C. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi,	20
1. Akumulasi Modal	20
2. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja	21
3. Kemajuan Teknologi.....	22
D. Korelasi antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Distribusi Pendapatan,.....	23
E. Pandangan Neoliberalisme Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,.....	28
F. Pandangan Islam Terhadap Pembangunan Ekonomi ..	30
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	35
B. Jenis Dan Sumber Data.....	36
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	37
1) Studi Literatur	37

2) Diskusi	38
3) Intuitif-Subyektif	38
D. Metode Analisa Data	39
BAB IV : OPTIMALISASI PERTUMBUHAN EKONOMI TINJAUAN PENDAPATAN DALAM PAHAM NEO- LIBERALISME	
A. Pengertian Neoliberalisme,.....	40
B. Sejarah Munculnya Paham Neoliberalisme,	43
1. Ordo Liberalisme Klasik.	45
2. Neo-Liberalisme.	48
C. Filsafat Dasar Neoliberalisme Dalam Ekonomi,.....	53
D. Kebijakan-Kebijakan Neoliberal Dalam Rangka Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi dari Tinjauan Pendapatan,.....	55
1. Liberalisasi	61
2. Deregulasi.....	63
E. Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi,	67
F. Kebijakan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Tinjauan Pendapatan dalam Paham Neoliberal di Indonesia.....	70
1. Penerapan Kebijakan Neoliberal di Indonesia	70
2. Dampak Kebijakan Neoliberal Bagi Indonesia.....	73
1. Dikuasainya Sektor Kepemilikan Umum Oleh Swasta	73
2. Terjebak Perangkap Utang	77
3. Semakin Lebarinya Kesenjangan Ekonomi	81
BAB V : PANDANGAN ISLAM ATAS OPTIMALISASI PERTUMBUHAN EKONOMI TINJAUAN PENDAPATAN DALAM PAHAM NEOLIBERAL	
A. Filsafat dan Nilai Dasar Ekonomi Islam,	83
B. Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam,	88
1. Konsep Islam dalam pembangunan Ekonomi.....	90
2. Model Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam.....	94
3. Peran Negara Dalam Pembangunan Ekonomi.....	96
C. Pandangan Islam Terhadap Kebijakan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Neoliberal Tinjauan Pendapatan	98
1. Liberalisasi Perspektif Islam.....	99
2. Deregulasi Perspektif Islam.....	105
D. Relevansi Konsep Pembangunan Islam dalam Konteks Indonesia	110

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN.....	118
B. SARAN	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Perbandingan Liberalisme dan Neoliberalisme.....	43
Tabel 4.2 : Rencana Pelaksanaan Privatisasi BUMN 1998 – 2003.....	75
Tabel 4.3 : Utang Luar Negeri Indonesia (dalam juta US\$)	80
Tabel 5.1 : Pertumbuhan Ekonomi dalam Konsep Islam dan Neoliberalisme.....	108
Tabel 5.2 : Beberapa Contoh Penerapan Sistem ekonomi Neoliberalisme yang Didukung oleh Pemerintah Indonesia	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1: Model Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam.....	96
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Bukti Konsultasi	126
Lampiran II : Surat Pernyataan	127

ABSTRAKSI

Ahmad Syuja', 2007, SKRIPSI. Judul "Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Tinjauan Pendapatan Menurut Paham Neo-liberal (Kajian dalam Perspektif Islam)".

Pembimbing : Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pertumbuhan ekonomi, Neoliberal, Islam

Krisis Ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari pemilihan pola sistem dan strategi kebijakan ekonomi. Kebijakan pemerintah saat orde baru sampai sekarang adalah dalam kerangka berfikir neoliberal yang lebih mengagungkan tingkat pertumbuhan dan stabilitas daripada pemerataan ternyata telah melahirkan satu bentuk kesenjangan yang luar biasa di berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu maka tidak salah jika kemiskinan di Indonesia selalu tetap tinggi sebagaimana yang dilaporkan BPS bahwa Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97 persen), berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Bagaimanakah kebijakan neoliberal ini dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dalam tinjauan pendapatan dan bagaimana Islam memandang kebijakan itu? Dua permasalahan ini yang diajukan dalam penelitian ini.

Metode penelitian ini adalah dengan metode deskriptif-analitis memberikan satu gambaran tentang kebijakan neoliberalisme diikuti analisa-analisa dalam perspektif Islam. Jenis data yang digunakan adalah data-data sekunder berasal dari literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah, artikel-artikel dari internet, dan majalah-majalah. Penelitian ini bersifat studi eksplorasi literatur dan pengumpulan datanya yaitu studi literatur, diskusi, dan intuitif-subyektif. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah teknik *content analysis*, analisis yang mendalam terhadap isi-isi dari literatur sehingga dapat sesuai dan mencapai tujuan analisis yang dimaksud.

Berdasarkan alat analisa diatas dapat ditemukan bahwa ada dua kebijakan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi tinjauan pendapatan menurut konsep neo-liberal yaitu liberalisasi, dan deregulasi. Dalam pandangan Islam, liberalisasi diakui keberadaannya tetapi mempunyai kaitan yang erat dengan tanggung jawab sosial. Sedangkan Deregulasi berarti anti intervensi pemerintah. Dalam Islam pemerintah harus bertanggung jawab atas anggotanya serta membahagiakan mereka dengan menghilangkan semua praktek yang mengancam kesejahteraan umum. Dan konsep Ekonomi Pancasila adalah sesuai dengan jiwa pembangunan Islami.

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Hampir 10 tahun berjalan Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sejak pertengahan Juli 1997 hingga sekarang masih belum ada tanda krisis akan segera berakhir. Seperti telah diketahui umum bahwa krisis ini bermula dari krisis moneter regional kawasan Asia Tenggara, yakni saat pemerintah Thailand mendevaluasi mata uang Bath pada tanggal 2 Juli 1997 terhadap Dolar US. Akibatnya nilai tukar Rupiah merosot tajam hingga pernah mencapai Rp15.000,00 per US\$ pada awal tahun 1998. Menurut Saidi (1998: 18) terdepresiasinya nilai Rupiah kemudian menjalar dengan cepat menjadi krisis ekonomi secara keseluruhan di segala bidang, yang semula dirasakan terjadi pada sektor perbankan. Sehingga untuk menghadapi rentetan krisis ini pemerintah mencoba mengambil garis kebijakan mendasar yang terdiri atas empat tindakan, yakni stabilisasi moneter, pengetatan likuiditas, penghematan dan penyesuaian struktural melalui liberalisasi perdagangan dan intervensi.

Namun implikasi mendasar dari krisis ini terhadap perekonomian nasional adalah dipertanyakannya kembali thesis kebijakan perekonomian nasional yang selama ini dijalankan. Pandangan spekulatif

internasional tentang Indonesia sebagai negara berkembang yang digadang-gadang sebagai *new emerging forces* dan anggota kelompok ekonomi Asia berkinerja tinggi (*high performing Asian economies*) dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata di atas 6-7% per tahun selama 25 tahun terakhir menjadi runtuh oleh krisis karena lemahnya fundamental dasar perekonomian.

Krisis Moneter telah menciptakan suasana ketergantungan ekonomi Indonesia pada kekuatan kapitalis luar negeri, lebih-lebih melalui cara-cara pengobatan Dana Moneter Internasional (IMF) yang tidak mempercayai serta mempertimbangkan kekuatan ekonomi rakyat dalam negeri khususnya di daerah-daerah. Kebijakan, program, dan teori-teori ekonomi yang menjadi dasar penyusunannya didasarkan pada model-model pembangunan neoliberal Amerika yang agresif tanpa mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat plural di Indonesia. Pakar-pakar ekonomi yang angkuh, yang terlalu percaya pada model-model teoritik-abstrak, berpikir dan bekerja secara eksklusif tanpa merasa memerlukan bantuan pakar-pakar non-ekonomi seperti sosiologi, ilmu-ilmu budaya, dan etika. Strategi pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan makro dengan mengabaikan pemerataan dan keadilan telah secara rata-rata menaikkan peringkat ekonomi Indonesia dari negara miskin ke peringkat negara berpendapatan menengah, namun disertai distribusi pendapatan dan kekayaan yang timpang, dan kemiskinan yang

luas. Reformasi ekonomi, politik, sosial-budaya, dan moral, membuka jalan pada reformasi total mengatasi berbagai kesenjangan sosial-ekonomi yang makin merisaukan antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin, antara daerah-daerah yang maju seperti Jawa dan daerah-daerah luar Jawa yang tertinggal (hasil seminar pendalaman ekonomi rakyat, 2002).

Konsekuensinya, berbagai kebijakan ekonomi yang pada dasarnya merupakan amanat IMF tersebut, seperti penghapusan subsidi, liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi sektor perdagangan, dan pelaksanaan privatisasi BUMN, akan terus berlanjut dalam era pemerintahan sekarang ini. Lebih-lebih pelaksanaan Post Program Monitoring (PPM) IMF secara resmi baru akan berakhir pada akhir 2007. Pertanyaannya, di manakah letak perbaikan nasib rakyat di tengah-tengah wacana dan rencana perombakan tim ekuin KIB tersebut? Jawabannya, seperti dikemukakan SBY ketika memunculkan nama Boediono, terletak pada kerangka berpikir ekonom neoliberal. Artinya, sesuai dengan kerangka berpikir IMF itu, perbaikan nasib rakyat terletak pada tinggi rendahnya investasi. Tinggi rendahnya investasi terletak pada tinggi rendahnya kepercayaan para investor asing. Sedangkan tinggi rendahnya kepercayaan para investor asing tergantung pada sejauh mana pemerintah berhasil menciptakan lingkungan makro-ekonomi yang stabil dan kondusif bagi kehadiran mereka. (Revrisond Baswir, 2005)

Lebih lanjut Revrisond Baswir (2005) mengatakan, dalam kerangka berpikir ekonomi neoliberal, perbaikan nasib rakyat memang tidak secara langsung merupakan tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab langsung pemerintah adalah menciptakan lingkungan makro-ekonomi yang stabil dan kondusif bagi mengalirnya investasi asing. Perbaikan nasib rakyat, dengan demikian, sangat tergantung pada kemurahan hati para investor asing tersebut.

Dengan meningkatnya ketergantungan perekonomian negara-negara miskin terhadap pemenuhan kepentingan para pemodal negara-negara kaya, fungsi pemerintah dalam perekonomian negara-negara miskin cenderung berubah. Dari melayani dan melindungi kepentingan rakyat, pemerintah negara-negara miskin berubah fungsi menjadi pelayan dan pelindung kepentingan para pemodal negara-negara kaya.

Oleh karena itu maka tidak salah jika kemiskinan di Indonesia selalu tetap tinggi sebagaimana yang dilaporkan BPS bahwa Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97 persen), berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Pertambahan penduduk miskin di daerah perdesaan sedikit lebih tinggi dari pada daerah perkotaan. Selama periode Februari 2005-Maret 2006, penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 2,06 juta, sementara di daerah perkotaan bertambah 1,89 juta

orang. Sedangkan Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Februari 2005, sebagian besar (64,67 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sementara pada bulan Maret 2006 persentase ini turun sedikit menjadi 63,41 persen (Berita Resmi Statistik No. 47 / IX / 1 September 2006).

Berkepanjangannya krisis ekonomi ini menunjukkan bahwa selama ini memang ada sesuatu yang salah (*there is something wrong*) dalam proses pembangunan nasional. Strategi dan sistem pembangunan nasional yang lebih mengutamakan pertumbuhan tinggi dengan topangan luar negeri ternyata tidak cukup efektif dan kuat menahan gelombang eksternal shock yang ada, Kebijakan *trickledown effect* tidak bisa membuktikan bahwa pemerataan itu berasal dari atas (*top down*), padahal pada hakekatnya pembangunan berarti pertumbuhan dan pemerataan adalah suatu proses perubahan dan, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri (Ismail Saleh, 1990: xxv). Oleh karena itu Baswir (2006: 12) menjelaskan bahwa krisis Indonesia sebenarnya adalah krisis pemikiran ekonomi bukan krisis ekonomi dalam pengertian biasa. Artinya, krisis ekonomi yang dialami Indonesia sesungguhnya bukanlah sebuah krisis yang tidak dapat ditangani, tetapi justru sesat pikir para ekonom neoliberal itulah yang membuatnya semakin menjadi-jadi dan sulit ditemukan cara penanggulangannya.

Kalau kita melihat kebelakang tentang bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia maka ini sebenarnya sesuai dengan kerangka berfikir neoliberal. Jantung gagasan ekonomi neoliberal bahwa pertumbuhan ekonomi akan optimal sebagaimana yang dijelaskan Wibowo (2004: 59) adalah jika, dan hanya jika, lalu lintas barang/jasa/modal tidak dikontrol oleh regulasi apapun. Optimalisasi itu juga hanya akan terjadi jika barang, jasa dan modal dikuasai oleh orang-perorangan yang akan menggerakkan untuk tujuan akumulasi laba pribadi. Maka mereka percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai hasil normal dari “kompetisi bebas” kompetisi yang agresif adalah akibat dari kepercayaan bahwa “pasar bebas” adalah cara yang efisien dan tepat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan diharapkan keputusan individual atas interes pribadi diharapkan mendapatkan bimbingan dari *invisible hand* sehingga masyarakat akan mendapat berkah dari ribuan keputusan individual tersebut. Pada akhirnya kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang tersebut akan *trickel down* kepada anggota masyarakat yang lain. (Mansour Fakih, 2002: 216-217). Mereka juga berpendirian bahwa dengan menghilangkan sejumlah hambatan terhadap perdagangan perusahaan besar dan berbagai investasi keuangan, maka itulah gagasan terbaik menuju pertumbuhan. Dan jalan terbaik untuk keluar dari kemiskinan. Bahkan mereka mengatakan bahwa orang yang menolak agenda globalisasi ekonomi berarti akan merugikan kepentingan

kaum miskin sendiri. Setiap orang dipersilahkan minggir dan menyerahkan seluruhnya kepada perusahaan-perusahaan besar, bankir-bankir, dan birokrasi-birokrasi global untuk melakukan perencanaan dan pemecahan atas berbagai persoalan global. Dan ini akan membawa berkah keselamatan bagi kaum miskin (Jerry Mander, dkk, 2001: 3-4).

Mengenai pengoptimalan pertumbuhan ekonomi, pada lingkup individual, nasional maupun global, pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dijelaskan oleh Wibowo dan Wahono (2003: 60) adalah pertama-tama tergantung pada tingginya tingkat penanaman modal (investasi) privat. Investasi pada gilirannya bergantung pada tingkat tabungan (*savings*), dan tabungan tergantung pada tingi-rendahnya penghasilan pribadi (*income*). Pertumbuhan *income* tergantung pada bekerjanya akumulasi laba yang hanya mungkin terjadi dalam perdagangan bebas. Soalnya bagaimana memulai proses itu, jika *income*, tabungan, dan investasi suatu masyarakat rendah. Maka cara mengatasi persoalan itu adalah penanaman modal, terutama dari negara-negara maju entah lewat suntikan modal, lewat pinjaman atau investasi perusahaan-perusahaan asing. Bagi kaum neoliberal dalam melakukan pembenaran lingkaran pertumbuhan ekonomi diatas, Wibowo dan Wahono (2003: 66) menjelaskan bahwa hanya orang kaya yang paling mungkin menabung dalam jumlah besar, sebab mereka punya *income* berlebih. Karena itu investasi juga hanya paling mungkin datang dari orang-orang kaya.

Maka, semakin tinggi *income* kaum kaya, semakin tinggi pula volume tabungan, dan pada gilirannya akan semakin tinggi juga investasi yang melahirkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi bagaimana mungkin terjadi aliran modal dari luar negeri bila tidak ada kebebasan lalu-lintas modal (barang/jasa)?

Dari pandangan diatas bahwa pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih mengutamakan pertumbuhan dalam kerangka neoliberal telah mengakibatkan kemiskinan di Indonesia yang sulit diatasi, maka jelaslah bahwa neo-liberalisme dengan gagasannya mengenai pengoptimalan pertumbuhan ekonomi adalah paham ekonomi dunia yang berbahaya yang harus dilawan dan dicegah. Akan tetapi, tidak banyak yang tahu sistem ekonomi seperti apa yang bisa membendung paham neo-liberalisme ini. Berharap pada sistem ekonomi Komunisme tentunya tidak bisa. Alih-alih sebagai pengganti, sistem ini sendiri sudah nyata-nyata ambruk. Pilihannya tinggal satu: Sistem Ekonomi Islam. Bagaimana sistem ini mampu menjadi lawan seimbang bagi neoliberalisme?

Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang tidak hanya mendorong pertumbuhan tetapi juga sekaligus adanya pemerataan. Suatu sistem yang berpihak kepada semua pelaku ekonomi, bahkan kepada semua orang. Yakni suatu sistem yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pasar, tetapi tetap memberikan peran kepada pemerintah, kekuatan sosial, dan hukum, untuk melakukan intervensi dan koreksi demi menjamin agar

pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat banyak; juga suatu sistem yang menjamin kekuatan ekonomi tidak terkonsentrasi pada sekelompok kecil pengusaha, disamping mampu melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat banyak, serta memberikan kesejahteraan lahir batin secara hakiki.

Islam adalah sebuah keyakinan universal yang sederhana dan mudah untuk dipahami dan dinalar. Menurut Chapra, Islam didasarkan pada tiga prinsip pokok yaitu: *tauhid*, *khilafah* dan *'adalah*. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta secara sadar dibentuk dan diciptakan oleh Tuhan, karena tidak mungkin jagad raya ini muncul secara kebetulan. Oleh karena itu manusia dituntut untuk beribadah kepada Allah SWT. Demikian juga manusia diciptakan adalah sebagai *kholifah fil ardhi*, jadi apa yang dipegang ditangannya adalah amanah dariNya yang harus dipertanggung-jawabkan. Kholifah pada dasarnya mengandung makna persatuan fundamental dan persaudaraan umat manusia, konsep persaudaraan ini tidak akan tercapai tanpa prinsip ketiga yaitu keadilan, manusia diciptakan adalah untuk menegakkan keadilan (Umer Chapra, 2000: 6-7).

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang lepas dari perdebatan, apakah peran negara harus dominan dalam menguasai faktor-faktor produksi ataukah diserahkan sepenuhnya kepada individu dan swasta. Sebab sistem ekonomi Islam berangkat dari sebuah

pandangan yang berbeda sama sekali, yaitu: Islam memandang bahwa seluruh harta yang ada di dunia ini (bahkan seluruh alam semesta ini) sesungguhnya adalah milik Allah, berdasarkan firman Allah:

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ^ج

“Dan berikanlah kepada mereka.. sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu” (Q.S. An-Nuur: 33).

Dari ayat ini dipahami bahwa harta yang dikaruniakan Allah kepada manusia sesungguhnya merupakan pemberian Allah yang dikuasakan kepadanya. Hal itu dipertegas dengan mendasarkan pada firman Allah:

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ^ط

“Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya” (Q.S. Al-Hadiid: 7).

Oleh karena itu berdasarkan deskripsi lingkaran pertumbuhan ekonomi tersebut diatas, maka pendapatan atau *income* masyarakat adalah titik awal untuk memulai laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan neoliberalisme dalam meningkatkan *income* suatu masyarakat itu? dan bagaimana pandangan Islam terhadap kebijakan optimalisasi tersebut? maka penulis ingin mengeksplorasi lebih jauh mengenai optimalisasi pertumbuhan neoliberal lewat judul **“Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Tinjauan Pendapatan dalam Paham Neo-liberal (Kajian dalam Perspektif Islam)”**.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan konteks penelitian yang telah ditetapkan diatas, maka yang jadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana optimalisasi pertumbuhan ekonomi tinjauan pendapatan dalam pandangan Neoliberal dan penerapannya di Indonesia?
2. Bagaimana optimalisasi pertumbuhan ekonomi tinjauan pendapatan paham Neo-liberal itu dalam perspektif Islam dan relevansi konsep pembangunan Islam dalam konteks Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berkaitan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pertumbuhan ekonomi dalam pandangan Neo-liberal dengan tinjauan pendapatan dan penerapan Optimalisasi tersebut di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pertumbuhan ekonomi dengan tinjauan pendapatan kaum Neo-liberal dalam perspektif Islam dan relevansi konsep pembangunan Islam dalam konteks Indonesia.

D. BATASAN PENELITIAN

Agar pembahasan yang diajukan tidak meluas dan untuk memudahkan analisa, maka perlu adanya pembatasan permasalahan. Dalam hal ini permasalahan akan lebih difokuskan pada kebijakan

optimalisasi pertumbuhan ekonomi dari indikator pendapatan saja, dan difokuskan pada pandangan Islam terhadap kebijakan tersebut dengan menjadikan Islam sebagai sistem ekonomi alternatif.

E. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian yang akan dilakukan penulis, diharapkan akan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis.

- a. Memberikan gambaran tentang kebijakan-kebijakan neo-Liberal dalam kaitannya dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dari tinjauan pendapatan.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian dalam pengembangan perekonomian Islam sebagai satu-satunya sistem yang ideal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Menambah wawasan keilmuan dan pemahaman tentang optimalisasi pertumbuhan ekonomi dalam pandangan Neo-Liberal tinjauan pendapatan yang dikaji dari sisi Islam.

- b. Bagi kalangan akademisi

1. Menambah khasanah penelitian terutama dalam pertumbuhan ekonomi baik dari pandangan Neoliberal

maupun dari Islam, yang merupakan objek penelitian yang masih baru

2. Untuk diteliti lebih lanjut oleh mahasiswa-mahasiswa atau akademisi muslim lainnya.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Optimalisasi adalah berasal dari kata optimal. Optimal menurut Pius dan Dahlan adalah paling bagus/tinggi; tertinggi; terbagus; paling menguntungkan (1994: 545). Jadi optimalisasi adalah proses untuk menuju paling bagus/tinggi; tertinggi; terbagus; paling menguntungkan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Irawan dan Suparmoko, 1999, 5).

Jadi optimalisasi pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan cara yang terbagus (penulis). Sebagaimana yang dikatakan Wibowo (2003: 60) diatas bahwa indikator pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah pendapatan, tabungan, dan investasi. Dalam penulisan ini hanya meninjau pada pendapatan karena pendapatan adalah awal dari siklus pertumbuhan ekonomi bisa berjalan.

Sedangkan neoliberalisme adalah kembalinya paham liberalisme klasik Adam Smith yang digagas oleh sebuah konsensus yang dimotori

oleh IMF dan Bank Dunia serta wakil dari perusahaan-perusahaan besar. (Wibowo dan Francis Wahono, 2004: 119).

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari enam bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub

BAB I : Pendahuluan, merupakan pengantar secara umum yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Sub bab dalam bab pendahuluan ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka, berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Sub bab dalam kajian pustaka ini terdiri dari hakekat pertumbuhan ekonomi, pengertian pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, pandangan neoliberalisme terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pandangan Islam terhadap pembangunan ekonomi

BAB III : Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam tema. Sub bab dalam metode penelitian ini

adalah desain penelitian, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, dan metode analisa data

BAB IV : Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Tinjauan Pendapatan dalam Paham Neoliberalisme, merupakan hasil pembahasan tentang konsep neoliberalisme dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. Sub bab dalam bab ini adalah pengertian neoliberalisme, sejarah munculnya paham neoliberalisme, filsafat dasar neoliberalisme dalam ekonomi, Kebijakan-kebijakan Neoliberal Dalam Rangka Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi dengan Tinjauan Pendapatan, peran negara dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, Kebijakan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Tinjauan Pendapatan dalam Paham Neoliberal di Indonesia.

BAB V : Pandangan Islam Atas Kebijakan Neoliberal, merupakan hasil pembahasan tentang kebijakan ekonomi dalam perspektif islam. Sub bab dari bab ini adalah Filsafat dan Nilai Dasar Ekonomi Islam, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam, dan Pandangan Islam Terhadap Kebijakan optimalisasi Pertumbuhan ekonomi tinjauan pendapatan paham Neoliberal.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran, merupakan pandangan terakhir terhadap persoalan yang dibahas dalam penelitian ini, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakekat Pertumbuhan Ekonomi

Perhatian utama masyarakat perekonomian dunia sekarang kebanyakan selalu tertuju pada bagaimana cara-cara untuk mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional. Para ekonomi maupun politisi dari semua negara, baik itu negara-negara kaya maupun miskin, semua sangat mendambakan dan menomorsatukan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pada setiap akhir tahun, masing-masing negara selalu mengumpulkan data-data statistiknya yang berkenaan dengan tingkat pertumbuhan GNP relatifnya, dan dengan penuh harap mereka menantikan munculnya angka-angka pertumbuhan yang membesarkan hati. “pengejaran pertumbuhan” merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua Negara di dunia dewasa ini. Pemerintahan di Negara manapun dapat segera jatuh atau bangun berdasarkan tinggi-rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam catatan statistik nasional. Seperti yang kita ketahui, berhasil-tidaknya program-program pembangunan di Negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, sering dinilai berdasarkan tinggi-rendahnya tingkat pertumbuhan output dan pendapatan nasional. Bahkan baik dan buruknya kualitas kebijakan pemerintah dan tinggi atau rendahnya mutu

aparatnya dibidang ekonomi secara keseluruhan biasanya diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan output nasional yang dihasilkan.

Mengingat konsep pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur penilaian pertumbuhan ekonomi nasional seperti itu sudah terlanjur diyakini serta diterapkan secara luas, maka kita tidak boleh ketinggalan dan mau tidak mau harus berusaha mempelajari hakekat dan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi tersebut.

B. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Istilah pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan pembangunan ekonomi (*economic development*) di kalangan ahli ada yang membedakan kedua istilah tersebut dan ada yang menganggapnya sama. Tetapi pada umumnya, para ahli ekonomi memberikan pengertian yang sama kepada kedua istilah tersebut. Dalam penggunaan yang lebih umum istilah Pertumbuhan ekonomi biasanya dinyatakan untuk melihat perkembangan ekonomi di negara-negara maju sedangkan pembangunan ekonomi digunakan untuk perkembangan ekonomi di negara-negara sedang berkembang.

Menurut Sadono Sukirno pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Ini artinya pembangunan ekonomi atau pertumbuhan

ekonomi mempunyai tiga sifat penting: (i) suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus menerus, (ii) usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan perkapita, dan (iii) kenaikan pendapatan perkapita itu harus berlangsung *dalam jangka panjang* (Sadono Sukirno 1978, 13). Atau pertumbuhan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi-rendahnya pendapatan riil per kapita. (Irawan dan Suparmoko, 1999, 5).

Profesor Simon Kuznets, salah satu ekonom besar yang pernah memenangkan nobel dibidang ekonomi pada tahun 1971 atas usahanya memelopori pengukuran dan analisis atas sejarah pertumbuhan pendapatan nasional negara-negara maju, telah memberikan suatu definisi yang cukup rinci mengenai pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Kuznets, "pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan dan penyesuaian penyesuaian, teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. (Michael P. Todaro 2000: 144).

Lebih lanjut Todaro (2000: 144) menyimpulkan bahwa ada tiga komponen yang harus dipahami dalam definisi tersebut yaitu :

1. Kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi atau perwujudan dari apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan untuk menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi (*economic maturity*) di suatu negara yang bersangkutan.
2. Perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.
3. Guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi baru, maka perlu diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Inovasi dibidang teknologi tanpa dibarengi dengan inovasi sosial sama halnya dengan lampu pijar tanpa listrik.

Jadi pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang terus menerus untuk menaikkan pendapatan perkapita dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa.

C. Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi

Ada tiga faktor atau komponen dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa sebagaimana yang dijelaskan oleh Michael P. Todaro (2000, 137). Ketiganya adalah:

1. akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia
2. pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. kemajuan Teknologi

1. Akumulasi Modal

Akumulasi modal (*capital accumulatiom*) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari.

Bentuk-bentuk investasi yang menjurus ke akumulasi modal bisa berupa investasi langsung (pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan bahan baku), dan investasi tidak langsung dalam berbagai jenis sumber daya (misal. Pembangunan sistem irigasi akan dapat memperbaiki kualitas tanah pertanian serta meningkatkan produktivitas lahan per hektar). Investasi secara

tidak langsung juga bisa pada sumber daya manusia yaitu dengan pembinaan SDM yang akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi. (Michael P. Todaro (2000, 138). Disamping itu, sumber-sumber kapital juga bisa dari berbagai sumber diantaranya; tabungan masyarakat, pajak, pinjaman pemerintah, penggunaan tenaga yang menganggur, inflasi dan modal asing. (Suparmoko, 1999: 242-247)

2. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif. Sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.

Namun menurut Suparmoko (1999: 239-240) hal yang demikian itu tidak berlaku sepenuhnya karena ada hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, sehingga setelah suatu tingkat penggunaan tenaga kerja tertentu, jumlah produk total yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut akan berkurang. Dengan kata lain setelah jumlah tertentu dari tenaga kerja tersebut, produk marginal tenaga kerja tambahan menjadi negatif. Pada saat itulah terdapat apa yang disebut dengan pengangguran tenaga kerja.

Dengan demikian aktor tenaga kerja tidak cukup dilihat dari jumlahnya saja, melainkan juga harus diperhatikan kualitas dari tenaga kerja tersebut.

3. Kemajuan Teknologi

Faktor teknologi tidak kalah pentingnya bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teknologi adalah cara untuk mengolah atau menghasilkan suatu jenis barang atau jasa tertentu.

Dalam pengertian yang sederhana, kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada tiga klasifikasi kemajuan teknologi yaitu; *pertama*, kemajuan teknologi yang netral. Ini terjadi jika teknologi tersebut memungkinkan untuk mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. *Kedua*, teknologi yang hemat tenaga kerja, misalnya penggunaan komputer elektronik, mesin tekstil otomatis, dll. Dan *ketiga*, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, misalnya mesin pemotong rumput dengan tenaga tangan. Disamping itu kemajuan teknologi juga dapat meningkatkan tenaga kerja, misalnya pembelajaran dengan video-tipe sehingga penyerapan bahan pelajaran menjadi lebih baik. Kemajuan teknologi juga dapat

meningkatkan modal, misalnya penggantian bajak dari kayu dengan bajak baja dalam produksi pertanian. (Michael P. Todaro (2000, 141-142).

D. Korelasi antara Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan

Pada umumnya dirasakan adanya suatu *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kekayaan. Apabila suatu negara menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, maka seringkali memang distribusi pendapatan menjadi terabaikan sehingga terjadilah kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Sebaliknya apabila distribusi pendapatan yang lebih diberikan bobot dalam upaya pembangunan ekonomi suatu negara, maka laju pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut akan menjadi relatif tertekan. Hal ini menurut Suparmoko (1999, 254), ini terjadi karena sering pertumbuhan yang cepat lebih banyak menggunakan metode produksi yang padat modal, sedangkan pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada distribusi pendapatan akan lebih banyak menggunakan teknologi produksi padat karya. Disinilah seolah-olah terdapat konflik antara tujuan pertumbuhan ekonomi dan tujuan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Namun dari penelitian yang diadakan oleh Ahluwaliah dkk. dalam (Suparmoko, 1999, 255), terbukti bahwa negara-negara maju umumnya

memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata, sedangkan untuk negara yang sedang berkembang atau negara yang pendapatannya rendah ada yang distribusi pendapatannya merata dan ada yang tidak. Mengapa tidak ada korelasi yang positif antara distribusi pendapatan yang merata dan tingginya pendapatan perkapita sebagai ukuran kemajuan suatu negara? Di negara maju, umumnya sudah terdapat lembaga yang mendukung untuk diusahakannya pemerataan distribusi pendapatan. Dipihak lain lembaga-lembaga yang mengusahakan adanya distribusi pendapatan di negara berkembang dan negara miskin belum banyak dijumpai.

Pada dasarnya terdapat tiga tipologi pembangunan pertumbuhan seperti yang dikemukakan oleh Gary Field (dalam Todaro, 2000: 185), yakni 1) tipologi pertumbuhan perluasan sektor-modern, dimana pengembangan ekonomi dua sektor, tradisional dan industri modern tertumpu pada pembinaan dan pemekaran sektor modern. Pada tipologi ini sulit diperoleh ketagasan tentang perubahan atas ketimpangan distribusi pendapatan, karena distribusi pendapatan bersifat fluktuatif, bisa dikatakan membaik namun bisa dikatakan memburuk. 2) Tipologi pertumbuhan yang memperkaya sektor modern. Pada tipologi ini pertumbuhan ekonomi memang berjalan pesat namun distribusi pendapatan semakin timpang, karena hasil pembangunan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. 3) Tipologi pertumbuhan yang

memperkaya sektor tradisional. Dalam tipologi pertumbuhan ini hampir semua manfaat dapat lebih dirasakan secara merata oleh segenap elemen masyarakat, terutama yang bergerak di sektor tradisional, dan sedikit saja yang menetes di sektor industri modern. Buah dari tipologi ini pendapatan meningkat dan menyebar lebih merata sehingga berhasil mengurangi angka kemiskinan. Pada tipologi ini peran masyarakat dalam menentukan arah perekonomian sangat besar karena adanya dukungan pemerintah pada sektor ekonomi rakyat. Pertumbuhan biasanya berkaitan dengan modernisasi, yakni adanya peranan teknologi tinggi dan alat ekonomi yang padat modal, sehingga hasil yang diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dan dapat diekspor. Implikasi selanjutnya yang diharapkan adalah meningkatnya tingkat pendapatan nasional (GNP). Padahal GNP merupakan indeks kesejahteraan dan pembangunan nasional yang tidak tepat (Todaro, 2000: 216). Sehingga seringkali terjadi pertentangan dalam perumusan kebijakan pembangunan, antara penekanan prioritas pada pertumbuhan ataukah pada pemerataan.

Prioritas pertumbuhan memang berhasil meningkatkan tingkat pendapatan nasional (GNP), karena pertumbuhan biasanya berkaitan dengan modernisasi. Berarti penekanan pada peranan teknologi tinggi dan alat yang padat modal. Namun disadari bahwa tingginya GNP tidak menggambarkan kenaikan pendapatan penduduk secara agregat, sementara pembangunan ekonomi yang memperbesar pertumbuhan dulu

baru membagikannya ternyata tidak bisa menutupi jurang sosial antara si kaya dan si miskin. Sedangkan prioritas pada pemerataan membawa konsekuensi pengorbanan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meskipun tidak bisa dikatakan angka pertumbuhan itu stagnan.

Kebijakan pembangunan yang mengarah pada pertumbuhan dan pemerataan memerlukan suasana yang stabil, karena stabilitas adalah syarat pokok bagi usaha pembangunan yang kontinyu. Stabilitas yang dinamis harus merupakan hasil dari pola pembangunan yang seimbang. Artinya, pembangunan yang senantiasa memelihara keseimbangan antara peningkatan produksi dengan laju yang cukup tinggi, dan pola pembagian hasil secara lebih merata (Prayitno dan Santosa, 1996:86). Karena dari dua aspek pertumbuhan dan pemerataan ini masing-masing memberikan andil besar bagi terselenggaranya kondisi stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

Sehingga untuk merealisasikannya diperlukan suatu pola kebijakan ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam menanggulangi ketidakmerataan, sambil tetap mempertahankan dan atau meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut Todaro (2000: 223-224) menyebutkan ada empat kebijakan yang bisa menjadi pilihan kebijakan pemerintah yang menyangkut empat unsur penting, yaitu: 1) Distribusi fungsional, berarti terdapatnya upaya perubahan atas distribusi pendapatan fungsional melalui pola kebijakan untuk mengubah harga-harga faktor

secara positif. Dari perubahan distribusi fungsional terdapat suatu pendekatan terhadap ekonomi tradisional. 2) Distribusi ukuran, berarti mengubah distribusi pendapatan melalui redistribusi progresif pemilikan harta (asset). Dengan demikian, garis kebijakan kedua adalah secara langsung mengurangi terpusatnya penguasaan harta, pendistribusian kekuasaan yang tidak merata, dan juga memperluas pendidikan serta kesempatan untuk memperoleh penghasilan. 3) pengurangan pendapatan golongan atas melalui pajak secara proporsional terhadap pendapatan dan kekayaan pribadi. Hal ini berarti adanya perubahan distribusi pendapatan golongan atas melalui pajak pendapatan dan kekayaan yang progresif. 4) Peningkatan distribusi pendapatan golongan bawah melalui pengeluaran pemerintah dari pajak yang diterima, baik secara langsung maupun tidak langsung, maksudnya ada perubahan dalam distribusi pendapatan golongan lemah melalui pembayaran tunjangan dan penyediaan barang dan jasa pemerintah.

Kesimpulan dari kebijakan yang ditawarkan oleh Todaro (2000: 229) ini adalah adanya suatu paket kebijakan ekonomi yang meliputi kebijakan untuk mengoreksi distorsi harga faktor produksi, kebijakan untuk merubah struktur distribusi kekayaan, kekuasaan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang disertai dengan kesempatan memperoleh penghasilan (pekerjaan), serta kebijakan yang dibuat untuk memodifikasi distribusi pendapatan melalui pajak progresif.

E. Pandangan Neoliberalisme Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana yang dijelaskan dalam konteks penelitian diatas, bahwa Jantung dari gagasan ekonomi-politik Neo-Liberalisme adalah argumen bahwa pertumbuhan ekonomi akan optimal, jika dan hanya jika lalu-lintas barang atau jasa atau modal tidak dikontrol oleh regulasi apapun. Optimalisasi itu juga hanya akan terjadi bila digerakkan oleh konsep '*Homo Economics*', yaitu barang atau jasa atau modal dimiliki dan dikuasai oleh orang-perorang yang akan menggerakannya untuk tujuan akumulasi laba pribadi sebesar-besarnya, sehingga "*Private Property*" pun menjadi absolut tanpa tanggung-jawab peran sosial apapun juga kecuali untuk akumulasi laba privat sebesar-besarnya. Dan keserakahan pun dimaklumkan sebagai sesuatu yang baik. (Wibowo 2004: 59)

Kalkulasi ekonomi ditempatkan sebagai satu-satunya kunci untuk mendekati semua masalah dan persoalan, maka terjadilah berbagai pemindahan regulasi dari lingkup arena sosial menjadi lingkup urusan personal saja. Apa yang semula dianggap sebagai masalah sosial yang merupakan persoalan negara dan membutuhkan kebijakan sosial atau *welfare system* -seperti kemiskinan, kekurangan gizi, pengangguran, dan sebagainya- kemudian dianggap hanya menjadi masalah individual atau personal semata yang hanya membutuhkan kebijakan individual *self-care* saja. Maka sekali lagi benar apa yang dikatakan Mansour Fakih (2004, 130-131), bahwa pemiskinan ini merupakan akibat dari suatu sistem dan

mekanisme politik yang bersembunyi pada kebijakan ekonomi dan politik yang diskriminatif dan meminggirkan.

Dalam hal *private property* yang berkaitan dengan kekuasaan pasar atas sektor publik, inilah yang membedakan konsep ekonomi-politik Neo-Liberalisme dengan konsep awal dari gagasan liberalisme yang diusung dalam konsep ekonomi-politik Liberalisme Klasik.

Wibowo (2004, 60) menjelaskan bagaimana lingkaran pertumbuhan ekonomi paham neoliberal. Pada lingkup individual, nasional, maupun global, pertumbuhan ekonomi pertama-tama tergantung pada tingginya tingkat penanaman modal (investasi) privat. Investasi pada gilirannya bergantung pada tingkat tabungan (*savings*), dan tabungan tergantung pada tinggi-rendahnya penghasilan pribadi (*Income*). Pertumbuhan *income* tergantung pada bekerjanya akumulasi laba yang hanya mungkin terjadi dalam perdagangan bebas. Yang dijual-belikan bisa barang, jasa, modal finansial, pengetahuan, ketrampilan, kecantikan, otot, dsb. Kenaikan *income* membawa kenaikan tabungan. Kenaikan tabungan membawa kenaikan investasi. Kenaikan investasi akan membawa tingginya pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Bagi negara miskin untuk memulai proses itu agar pertumbuhan ekonomi lebih optimal, maka suntikan modal adalah suatu keharusan. Disinilah letak pentingnya berbagai kebijakan deregulasi-liberalisasi (modal, investasi, barang/jasa, tariff, pajak, dsb) menurut paham neoliberalisme.

F. Pandangan Islam Terhadap Pembangunan Ekonomi

Strategi pembangunan ekonomi biasanya dipahami dari dua sudut pandang yang sering berseberangan yaitu pilihan terhadap pertumbuhan ekonomi ataukah pemerataan sosial. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi maka pembangunan ekonomi seringkali dimaknai secara terbatas sebagai usaha untuk memperbesar output nasional melalui sistem produksi yang dikembangkan dan tercermin pada tingginya produk domestik bruto. Sementara jika dilihat dari segi pemerataan sosial maka pembangunan tidak saja dibatasi pada peningkatan output tetapi yang lebih penting lagi adalah distribusi output nasional yang berlangsung secara adil, merata dan terus menerus.

Dalam Islam strategi pengembangan ekonomi sebagaimana yang diungkapkan oleh M.N. Siddiqi (1986, 26), mempunyai khas yang utama yaitu bahwa keadilan sosial dan kemakmuran berjalan bergandengan. Ini terjadi karena adanya motivasi bahwa Islam melaksanakan segala sesuatu untuk perkembangan ekonomi. Alasan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bukanlah merupakan pendorong utama dalam Islam. Usaha-usaha pengembangan umumnya bersifat sosial, tiap individu secara sukarela bekerja sama di dalam usaha tersebut.

Ini semua terjadi karena Islam mempunyai pandangan hidup yang berbeda dengan sistem lainnya. Pembangunan atau pertumbuhan ekonomi dalam Islam selalu didasari oleh pandangan hidup yang telah

ditetapkan oleh Allah. Umar Chapra (2000, 6) menjelaskan bahwa pandangan hidup Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu *tauhid*, *khilafah* dan *keadilan*. *Tauhid* berarti kesadaran ketuhanan bahwa manusia diciptakan adalah untuk patuh dan beribadah kepadaNya. *Khilafah* berarti semua sumberdaya-sumberdaya yang ada ditangannya adalah amanah yang diberikan oleh Allah dan akan dipertanggung jawabkan dihadapanNya kelak. Konsep khilafah yang berarti mempunyai makna persatuan fundamental dan persaudaraan manusia akan tetap kosong jika tidak dibarengi dengan pandangan hidup yang ketiga adalah *keadilan*, manusia diciptakan untuk menegakkan keadilan.

Jadi pembangunan dengan keadilan adalah jika doktrin *khilafah* dan *'adalah* telah terwujud dengan memenuhi kebutuhan semua orang, pembagian pendapatan dan kekayaan yang adil, pemberian kesempatan kerja penuh dan perlindungan pada alam sekitar (Umar Chapra, 2000, 9)

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dalam pandangan Islam tidaklah untuk dirinya sendiri, tidak pula peningkatan GNP (pendapatan nasional kotor) merupakan satu-satunya ukuran "pertumbuhan ekonomi" menurut Islam. Tujuannya adalah suatu hidup sejahtera dengan segala dimensinya, dan aspek ekonomi hanyalah salah satu dimensi (M.N. Siddiqi, 1986, 26). Kesejahteraan ini meliputi fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu

memaksimumkan *output* total semata-mata tidak dapat menjadi tujuan dari sebuah masyarakat muslim. Memaksimumkan *output*, harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditujukan kepada kesehatan rohani yang terletak pada batin manusia, keadilan serta permainan yang *fair* pada semua peringkat interaksi manusia. Hanya pembangunan semacam inilah yang selaras dengan tujuan-tujuan syari'ah (*maqashid as-syari'ah*). (Umar Chapra, 2000, 8).

Untuk mewujudkan gagasan Pertumbuhan dengan keadilan bagi semua, Islam mempunyai filsafat ekonomi yang berbeda dengan filsafat sistem-sistem ekonomi lainnya. Ada tiga asas pokok filsafat ekonomi dalam Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Adi Sasono(1998, 36-38), yaitu sebagai berikut:

1. Dunia ini, semua harta dan kekayaan adalah milik Allah dan menurut kepada kehendak-Nya. Manusia sebagai khalifah-Nya hanya mempunyai hak khilafat dan tidak absolut serta dengan melaksanakan hukum-Nya; dan mereka yang menyatakan kepemilikan eksklusif tidak terbatas berarti ingkar kepada kekuasaan Allah.
2. Allah itu Esa, Pencipta segala makhluk, dan semua yang diciptakan tunduk kepada-Nya. Salah satu hasil ciptaan-Nya adalah manusia yang berasal dari substansi yang sama, dan memiliki hak dan kewajiban yang samasebagai khalifah Allah di muka bumi. Alam ini, semua flora dan fauna ditundukkan oleh Allah sebagai sumber

manfaat ekonomis dan keindahan bagi umat manusia. Sedangkan ketidak merataan karunia ni'mat dan kekayaan sumber-sumber ekonomi kepada perorangan maupu bangsa adalah kuasa Allah pula, agar mereka yang diberi kelebihan sadar menegakkan persamaan masyarakat (egalitarian) dan bersyukur kepada-Nya.

3. Iman kepada Hari Pengadilan sebagai asas ketiga sangat penting dalam filsafat ekonomi dalam Islam, karena akan mempengaruhi tingkah laku ekonomi manusia. Seorang muslim yang melakukan aksi ekonomi tertentu akan mempertimbangkan akibatnya pada hari kemudian.

Ketiga asas filsafat ekonomi dalam Islam seperti diuraikan diatas, sebenarnya berpangkal kepada asas tauhid, yang jelas sangat berbeda jauh dengan asas filsafat ekonomi lainnya. Filsafat ekonomi kapitalisme tergambarakan pada prinsip *laissez faire* dan kekuasaan tersamar, kebebasan orang diberikan sepenuhnya untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya. Filsafat ini selanjutnya memandang bahwa Tuhan itu memang ada, tetapi tidak ikut turut campur dalam bisnis manusia, atau Tuhan itu sudah pensiun, tidur, atau sudah pindah atau sedang jalan-jalan ke negara-negara dan bangsa yang sedang berkembang. Filsafat ini menggambarkan *agnostisme* yang pada gilirannya akan menerima akibat fatal bagi keseimbangan eksistensi konsep *triangle* (filsafat Tuhan-Manusia-Alam, dimana Tuhan terletak disudut puncak) . Walau masih

mengaku masih ada segi-segi moral dan ruhani agama dalam kehidupan, filsafat ini telah membawa manusia kepada kehidupan yang materialistik. (Adi Sasono, 1998: 36),

Karena itu Khursyid (dalam Muhammad, 2004: 140). menekankan bahwa landasan pembangunan ekonomi dalam pandangan Islam adalah berakar pada kerangka nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan al-Hadist kemudian menolak sikap imitative. Artinya model kapitalisme maupun sosialisme bukan merupakan *ideal type*, kendatipun juga berupaya mengumpulkan semua pengalaman dari semua sumber yang bermanfaat untuk diadaptasi dan diintegrasikan dalam kerangka Islam tanpa harus mengurangi nilai-nilai normatif yang ada

Pembangunan ekonomi dalam Islam adalah pembangunan umat manusia dan peningkatan taraf hidup serta kualitas hidup mereka dalam rangka menunjukkan ketaataanya pada Tuhan yang menciptakannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam menyusun penulisan ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas pada masa sekarang (Nazir, 1988:63). dengan metode deskriptif ini penulis mencoba membuat satu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena-fenomena yang terjadi dalam hal ini yang berkaitan dengan optimalisasi pertumbuhan ekonomi dalam tinjauan pendapatan serta relevansi konsep Islam sebagai alternatif pembangunan di Indonesia.

Pola pendekatan yang dilakukan dalam memecahkan permasalahan yakni dengan menggunakan desain deskriptif-analitis. Melalui pendekatan studi deskriptif-analisis ini penulis berkehendak memberikan satu gambaran tentang fenomena-fenomena yang terdapat di seputar fokus permasalahan dengan diikuti satu analisa-analisa dengan tujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa yang ada dan mengadakan

interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan dari fenomena yang terjadi (Nazir, 1988:105)

B. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam mendukung pembahasan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah data-data sekunder. Menurut Moleong (2000, 112), data sekunder merupakan data-data yang berasal bukan langsung dari pihak yang bersangkutan (objek yang diteliti), melainkan berasal dari pihak lain seperti literatur perpustakaan, artikel dalam majalah, jurnal-jurnal penulisan, yang berkaitan, dan hasil penulisan terdahulu.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah, artikel-artikel dari internet, majalah-majalah. Diantara buku-buku yang menjadi sumber data utama antara lain:

1. Budi Winarno, 2004, *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru: Peran Negara Dalam Pembangunan*, Penerbit Tajidu Press, Yogyakarta
2. I Wibowo, 2004, *Neoliberalisme*, Penerbit Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta
3. Jerry Mander dkk, 2004, *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan*, Penerbit Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta.

4. Mansour Fakih , 2004. *Bebas Dari Neoliberalisme*, cet II, Penerbit INSIST Press, Yogyakarta
5. Revrisond Baswir ,2006 *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
6. Syed Nawab Haider Naqvi, 2003, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
7. Serta buku-buku lain yang dan juga majalah-majalah, jurnal, surat kabar, maupun artikel yang ada kaitannya dengan tema yang diangkat.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi eksplorasi literatur. Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan maka penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Studi Literatur

yaitu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber bacaan seperti :

- b. *Tex book* dan buku-buku yang mendukung penelitian.
- c. Literatur berupa majalah, surat kabar, artikel, makalah dan lain sebagainya.

d. Referensi atau rujukan yang berupa skripsi terdahulu yang mendukung penelitian ini.

2) Diskusi

Yaitu cara pengumpulan data dengan cara membicarakan dan membahas suatu masalah tertentu dengan praktisi dan pengamat ekonomi yang mempunyai kompetensi dibidangnya atau dengan kelompok orang untuk memecahkan masalah tersebut.

3) Intuitif-Subyektif

Menurut Simogaki (1993) seperti yang dikutip Ghofur (1998) dalam Aan Rosyadi (2001, 23) yang dimaksud dengan intuitif-subyektif adalah merupakan melibatkan pendapat penulis atas masalah-masalah yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini, pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam usaha untuk memecahkan masalah terbatas pada kemampuan penulis untuk memahami dan memecahkannya dengan berdasar wawasan dan dukungan pustaka yang dapat dihimpun oleh penulis. Metode intuitif-subyektif ini adalah metode yang menggabungkan antara rasionalitas dan meta rasio, artinya pendapat atau pemaknaan yang dilakukan penulis tidak hanya melibatkan rasio saja, tetapi juga meta rasio (jiwa/ spiritual).

D. Metode Analisa Data

Proses dalam menganalisa data dilakukan penulis dengan menggunakan teknik *content analysys*. *content analysys* menurut Krippendorff adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data atas dasar konteksnya. (Soejono dan Abdurrahman, 2003, 13) atau menurut Sanapiyah Faisal, (1995), dalam Subhan (2005, 17) yaitu analisis yang mendalam terhadap isi-isi dari literatur, baik itu literatur primer maupun sekunder, sehingga dapat sesuai dan mencapai tujuan analisis yang dimaksud. Dalam hal ini adalah dengan melakukan kajian kepustakaan terhadap informasi yang diperoleh baik dari kepustakaan, media cetak maupun elektronik. Informasi yang berkaitan dengan topik penulisan selanjutnya dikaji secara komprehensif. Melalui cara seperti ini dimunculkan satu bentuk kritikan ataupun saran yang bersifat umum terhadap inti permasalahan yang dianalisa. Dari saran dan kritik tersebut, akhirnya dapat diberikan suatu tawaran alternatif pemecahan dan sekaligus ditarik kesimpulan.

BAB IV

OPTIMALISASI PERTUMBUHAN EKONOMI TINJAUAN PENDAPATAN DALAM PAHAM NEOLIBERALISME

Dalam bab ini akan dibahas seputar neoliberalisme dan kebijakan-kebijakannya dalam rangka optimalisasi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dalam tinjauan pendapatan, dijelaskan juga peran negara paham neoliberalisme dalam pembangunan ekonomi, serta kemunculan neoliberalisme di Indonesia dan dampak kebijakan neoliberal terhadap perekonomian Indonesia.

A. Pengertian Neoliberalisme

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan neoliberalisme Mansour Fakih mengatakan dalam buku-nya *Bebas dari Neoliberalism* bahwa membahas neoliberalisme, akan menjadi sulit jika kita tidak menyinggung apa itu liberalisme. Paham liberalisme berkonotasi luas, dapat mengacu pada paham ekonomi, politik bahkan dapat juga sebagai gagasan agama. Dalam sistem politik Amerika Serikat, bahkan liberalisme dipergunakan sebagai strategi untuk menghindarkan konflik sosial. Bagi kalangan orang miskin maupun buruh Amerika, anehnya kata “liberal” dipahami lebih “progresif” dibandingkan dengan “konservatif” atau bahkan dianggap lawan dari “sayap kanan”. Para politisi konservatif di

sana umumnya khawatir jika di cap sebagai “liberal”, namun ketakutan label itu tidak ada sangkut pautnya dengan liberalisme ekonomi maupun neoliberalisme yang sedang ada di depan kita. (Mansour Fakih 2004: 53).

Lebih lanjut Mansour Fakih (2003: 54-56) menjelaskan bahwa liberalisme yang berkaitan dengan ekonomi inilah yang nantinya berkembang menjadi neoliberalisme. Kata *neo* dalam Neoliberalisme lanjutnya, adalah sesungguhnya merujuk kepada bangkitnya kembali bentuk baru aliran ekonomi liberalisme lama yang mulanya dibangkitkan oleh ekonom Inggris Adam Smith dalam karyanya yang berjudul *The Wealth of Nations* (1776), dimana ia dan kawan-kawanya menggagas penghapusan intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi. Pemerintah haruslah membiarkan mekanisme pasar bekerja, pemerintah seharusnya melakukan deregulasi, dengan mengurangi segenap restriksi pada industri, mencabut semua rintangan birokratis perdagangan, ataupun menghilangkan tarif bagi perdagangan demi menjamin terwujudnya *free trade*. Perdagangan dan persaingan bebas adalah cara terbaik bagi ekonomi nasional untuk berkembang. Dengan demikian, liberalisme disini berkonotasi “bebas dari kontrol pemerintah” atau kebebasan individual untuk menjalankan persaingan bebas, termasuk kebebasan dari kaum kapitalis untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Lebih luas lagi Herry Priyono (2005) menjelaskan bahwa neoliberalisme bukanlah hanya sekadar ekonomi. Ia visi tentang manusia

dan masyarakat, dengan cara pikir ekonomi yang khas sebagai perangkat utama. Mungkin dua lapis definisi yang saling terkait dapat membantu memahami jantung filsafat ekonomi neoliberalisme.

1. **Visi antropologis** ; Lain dengan liberalisme abad ke-19, neoliberalisme berkembang melalui reduksi manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo oeconomicus*). Yang menarik dari visi neoliberal adalah pengandaian manusia sebagai *homo oeconomicus* direntang luas untuk diterapkan pada semua dimensi hidup manusia. Pada gilirannya, perspektif *oeconomicus* itu direntang untuk menjadi prinsip pengorganisasian seluruh masyarakat. Inilah aspek yang mungkin paling tegas membedakan ekonomi neoliberal dari ekonomi liberal klasik.
2. **Virtualisasi ekonomi**; Dalam stagnasi ekonomi negara-negara maju pada dasawarsa 1970-an, dan dalam revolusi teknologi informasi sejak awal dekade 1980-an, kecenderungan itu mengalami evolusi lanjut dan menghasilkan ciri utama neoliberalisme. Perspektif *oeconomicus* bukan hanya direntang untuk diterapkan pada dimensi lain hidup manusia, bahkan dalam perspektif *oeconomicus* sendiri berkembang hierarki prioritas: prioritas sektor finansial (*financial capital*) atas sektor-sektor lain dalam ekonomi. Itulah mengapa tak sedikit ahli menyimpulkan, neoliberalisme merupakan cara para tuan besar modal merebut kembali kekuasaan, sesudah mereka terkekang dalam periode setelah PD II sampai dasawarsa 1970-an.

Tabel 4.1
Perbandingan liberalisme dan neoliberalisme

	Liberalisme	Neoliberalisme
Arti	Paham yang digagas oleh Adam Smith abad 18 M. yaitu paham yang mempertahankan otonomi individu melawan intervensi komunitas. Paham ini disebut juga liberalisme klasik	Paham yang digagas oleh Hayek dkk. yang terkumpul dalam Mazhab Chicago tahun 1947. Neoliberalisme berarti kembalinya paham liberalisme lama hanya waktu timbulnya serta konteks kemunculannya dan strategi berbeda
Nilai dasar Ekonomi	Kebijakan sosial (<i>Welfare System</i>) yang minimal adalah sebagai syarat bekerjanya ekonomi	Kebijakan sosial harus dihapus jika mengganggu jalannya kinerja pasar atau diubah sesuai dengan prinsip pasar bebas
Konsep <i>Private property</i>	Mempunyai tugas sosial untuk menyejahterakan seluruh masyarakat.	Tanpa peran sosial apapun kecuali untuk akumulasi modal.
Konsep Pemerintah	Masih memberikan ruang bagi pemerintah lewat tata-keadilan atau sebagai "penjaga malam"	Memangkas habis peran Negara dalam ekonomi.

Sumber: Data diolah dari buku neoliberalisme (I. Wibowo dan Francis Wahono (ed)

B. Sejarah Munculnya Paham Neoliberalisme

Sejarah munculnya paham neoliberalisme yang kita kenal sekarang ini, dapat ditelusuri sejak runtuhnya sistem ekonomi liberalisme klasik Adam Smith dengan terjadinya depresi ekonomi (*the Great Depression*) di Amerika Serikat pada tahun 1930-an, dimana sistem ekonomi model liberalisme ini menjadi dasar bagi ekonomi Amerika Serikat sejak dulu.

Saat itulah banyak gagasan-gagasan baru muncul dan membuat arah sejarah baru perekonomian dunia termasuk teori pembangunan Keynes dan Neoliberalisme.

Krisis ekonomi depresi itu memunculkan seorang ekonom berkebangsaan Inggris JM Keynes tampil dengan pemikiran alternatif terhadap paham liberal. Ia mengembangkan teori yang menentang kebijakan liberalisme. Sebaliknya Keynes mengembangkan gagasan yang justru mempertahankan "*full employment*" buruh berperan strategis bagi perkembangan kapitalisme, dan untuk itu peran pemerintah dan Bank Sentral justru menurutnya harus dilibatkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Inilah gagasan yang mempengaruhi Presiden Roosevelt yang kemudian mengembangkan "*New Deal*" karena dianggap berhasil menyelamatkan rakyat Amerika waktu itu. Sejak itulah peran pemerintah dalam ekonomi makin diterima. (Mansour Fakih, 2003: 55)

Seiring dengan maraknya pendukung Keynes, muncul kelompok yang idenya berseberangan dengan kelompok Keynes yang dikenal masih setia dengan ide-ide klasiknya Adam Smith yang dikenal sebagai kelompok 'kanan baru' atau Neo-liberal. Kelompok ini menyerang fondasi kebijakan keynesian dengan mengambil momentum krisis ekonomi yang tidak bisa diatasi oleh kebijakan Keynesian. Akibat terjadinya inflasi di tahun 1970-an yaitu ketika negara-negara Arab membentuk kartel, OPEC, yang menyebabkan harga minyak dunia melambung tinggi yang

mengakibatkan kenaikan harga-harga dan upah-upah. Akibat yang lebih jauh adalah mendorong terjadinya resesi ekonomi, pengangguran, dan inflasi yang melambung hingga mencapai angka 20% di seluruh negara. Ini semua menurut kelompok 'kanan baru' disebabkan kebijakan Keynesian yang terlalu banyak memberi peran kepada negara. (Budi Winarno, 2004: 85-86).

Ada dua gagasan yang masih mendasarkan ide-idenya pada Adam Smith yaitu Ordo Liberal dan Neo-liberal. Menurut Wibowo dan Francis Wahono, (2004: 59), yang membedakan antara konsep ekonomi-politik Neo-Liberal dengan konsep awal dari gagasan liberalisme yang diusung dalam konsep ekonomi-politik Ordo Liberal adalah mengenai *private property* yang berkaitan dengan kekuasaan pasar atas sektor publik. Menurut ordo liberal *private Property* masih mempunyai tugas sosial untuk menyejahterakan masyarakat. Sedangkan paham neoliberal *private Property* menjadi absolut dan keramat, tanpa peran sosial apapun hanya untuk akumulasi laba privat.

1. Ordo liberalisme klasik.

Sebuah kelompok para ahli hukum dan ekonomi yang tergabung dalam "Mazhab Freiburg", antara tahun 1928-1930, mengembangkan sebuah gagasan ekonomi-politik yang kemudian luas dikenal sebagai gagasan ekonomi-politik "Ordo Liberalisme".

Untuk membedakan dengan gagasan Liberalisme yang kita kenal dewasa ini, Ordo Neoliberalisme. Maka untuk selanjutnya gagasan mazhab Freiburg ini disebut sebagai "Ordo Liberalisme Klasik". Gagasan utama "Ordo Liberalisme Klasik" adalah "Ekonomi Pasar Sosial" atau (*Soziale Marktwirtschaft* atau *Social Market Economy*), yaitu sebuah sistem ekonomi bebas yang disertai dengan berbagai regulasi yang diciptakan untuk menjaga agar kinerja pasar tetap kompetitif dan adil, serta untuk mencegah konsentrasi kekuasaan ekonomi, yang biasanya terjadi dalam bentuk kartel atau trust atau perusahaan raksasa. (Wibowo dan Francis Wahono, 2004: 48-49)

Landasan dasar pemikiran konsep ekonomi-politik "Ordo Liberalisme Klasik", sebagaimana yang dijelaskan Wibowo dan Francis Wahono (2004, 49-51), adalah sebagai berikut:

- 1) Gagasan anti-naturalistik tentang pasar dan kompetisi. Konsep pasar atau market dilihat sebagai salah satu dari berbagai macam model hubungan sosial bentukan manusia. Pasar bukanlah suatu gejala alami seperti gempa bumi atau musim semi, misalnya. Dalam gejala alami tersebut, bahkan sendainya tidak ada manusia sekalipun maka hukum-hukum alaminya itu akan tetap berlaku. Oleh karena pasar bukanlah gejala alami, maka pasar dapat diciptakan dan dibatalkan menurut desain dari kehendak manusia. Tidak ada ekonomi yang terpisah dari politik, sebagaimana tak ada

politik yang terlepas dari ekonomi, sehingga kinerja pasar juga membutuhkan adanya tindakan-tindakan "politik" yang bertugas menciptakan sederet kondisi bagi operasinya agar adil dan kompetitif.

- 2) Kaum Ordo liberalis klasik, menolak konsepsi sejarah yang mengasalkan "perubahan sosial" hanya pada proses-proses "perubahan ekonomi" semata. Proses perubahan sosial terbentuknya ekonomi-politik kapitalisme maupun sosialisme marxisme adalah sejarah institusional-ekonomi, dimana antara "ekonomi" dan "infrastruktur social" terjadi suatu hubungan sebab-akibat yang timbal-balik.
- 3) Para pemikir Ordo liberalis klasik, menolak kinerja kapitalisme yang hanya diasalkan pada logika modal atau capital semata. Transaksi ekonomi hanyalah salah satu bentuk dari relasi sosial manusia, oleh karenanya hubungan-hubungan sosial manusia bukanlah untuk mengabdikan kepada kapitalisme, melainkan kapitalisme yang harus mengabdikan untuk membantu kebutuhan relasi sosial manusia agar berlangsung dengan adil dan kompetitif.
- 4) *Keempat*, dalam gagasan ordo liberal klasik, kebijakan sosial merupakan prasyarat mutlak bagi bekerjanya ekonomi yang adil dan kompetitif. Serangkaian kebijakan sosial, mutlak diperlukan sebagai pencegah terjadinya kesenjangan kekuasaan ekonomi yang

tajam, serta untuk menciptakan dan memperluas etos *entrepreneurship* dalam masyarakat, juga untuk menciptakan iklim inovasi disegala bidang.

- 5) *Kelima*, kaum Ordo liberal klasik melihat soalnya tidak terletak pada bagaimana "menciptakan kebebasan ekonomi dalam konteks tata-negara" yang ada, melainkan bagaimana "menciptakan tata-negara yang menjamin kebebasan ekonomi".

Dari lima pokok gagasan ekonomi-politik ordo liberalisme klasik seperti tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ordo liberalisme klasik mencoba membuat perimbangan antara kebebasan dan keadilan sosial, manusia individual dan manusia komputer. Gagasan ini mencoba menerobos pilihan-pilihan ekstrem antara ekonomi-politik sosialisme negara dimana berlaku sistem ekonomi komando, dengan ekonomi-politik kapitalisme dimana berlaku sistem ekonomi yang dikuasai oleh konsentrasi kekuasaan modal lewat perusahaan-perusahaan raksasa, kartel, dan trust.

2. Neo-liberalisme.

Ditahun 1947, Hayek mengadakan konferensi tertutup di Mont Pelerin Swiss. Mereka disatukan oleh keprihatinan atas munculnya gelombang "kolektivisme" yang melanda Eropa. Konferensi itu membuahkkan kesepakatan pada pembentukan sebuah kelompok

dengan nama The Mont Pelerin Society. Tahun 1950, Hayek hijrah ke Amerika Serikat untuk kemudian bergabung menjadi anggota staf akademis di Universitas Chicago. Pada saat itu, para ekonom di Universitas Chicago seperti Milton Friedman, George Stigler, Gary Becker, sedang getol-getolnya mengembangkan pemikiran-pemikiran tentang pasar bebas. Friedman dikenal penentang keras tentang campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi, gagasan dari ekonom John. M. Keynes. (Wibowo dan Francis Wahono, 2004: 51-52). Kelompok ini banyak yang mengatakan sebagai kelompok “kanan baru”.

Tahun 1937 - ketika Komunisme dan Fascisme melanda Eropa - Friedrich August von Hayek, ekonom Austria, menerbitkan "*Economics and Knowledge*", yang menyatakan bahwa kapitalisme pasar bebas bukan sekedar bentukan sosial atau *sosial construct*, tetapi sebuah mekanisme alami untuk mengelola informasi. Tahun 1944, kembali menerbitkan "*The Road to Serfdom*" yang menuliskan kritik keras dan tajam terhadap sosialisme dan segala bentuk ekonomi perencanaan sentral. Dia mengajukan gagasan tentang keunggulan Kapitalisme Pasar Bebas. Menurutnya, dengan membiarkan jutaan individu mereaksi secara bebas, maka akan terjadi optimalisasi alokasi modal dan kreativitas manusia serta tenaga kerja, yang tak mungkin dapat

ditiru oleh ekonomi perencanaan sentral. (Wibowo dan Francis Wahono, 2004: 52)

Salah seorang pelopor kelompok Kanan Baru adalah Milton Friedman, yang berangkat dari golongan moneteris. Secara garis besar pokok pikiran kelompok ini ada tiga. *Pertama*, intervensi mendalam dalam perekonomian merupakan ancaman yang serius bagi kemajuan ekonomi. *Kedua*, menggugat program-program kesejahteraan dan *welfare State* Keynes. Mereka berpendapat bahwa redistribusi pendapatan sebagai suatu bentuk ketidakadilan. Dalam pandangan mereka, para penerima santunan adalah pemalas dan bahkan parasit sosial karena memperoleh uang dari anggaran pemerintah dan tidak menganggap kerja sebagai salah satu nilai tertinggi dalam masyarakat dan sebagai sumber kekayaan real. Dan yang *ketiga*, adalah pengagungan terhadap pasar, hanya dengan pasar bebaslah kesejahteraan dan perdamaian akan dapat diwujudkan. (Budi Winarno, 2004, 86-88).

Perubahan kemudian terjadi seiring krisis minyak dunia tahun 1973, akibat reaksi terhadap dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam perang Yom Kippur, dimana mayoritas negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah melakukan embargo terhadap AS dan sekutu-sekutunya, serta melipatgandakan harga minyak dunia, yang kemudian membuat para elit politik di negara-negara sekutu

Amerika Serikat berselisih paham sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, dan beban biaya-biaya sosial demokrat (biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya). Pada situasi inilah ide-ide libertarian sebagai wacana dominan, tidak hanya di tingkat nasional dalam negeri tapi juga di tingkat global di IMF dan World Bank. (Triatmojo, 2006)

Revrisond B. Lebih lanjut menjelaskan, neoliberalisme serta-merta menemukan momentum untuk diterapkan dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia setelah terpilihnya Margaret Thatcher sebagai PM Inggris tahun 1979 dan tahun 1980 Ronald Reagan terpilih sebagai Presiden AS,. (2006: 80).

Dibawah kepemimpinan dua tokoh baru ini terjadilah pergeseran prioritas secara jelas, peran pemerintah secara fundamental berubah dengan cepat, meninggalkan komitmen pemerintah dalam *welfare state* dan *full employment* dengan lebih mementingkan pelayanan swasta dibanding publik. Walaupun antara kedua pemimpin ini terdapat beberapa perbedaan, Thatcher memakai moneterisme dengan menekankan control ketat atas *money supply*, sedangkan Reagan memakai *supply-side* dengan memberikan insentif sebesar-besarnya bagi produksi. (I. Wibowo dan Francis Wahono, 2003: 21)

Selain itu, kedua pemimpin tersebut sama-sama menyakini teori “*trickle down effect*) yang mengklaim bahwa jika si kaya akan mendapatkan insentif seperti pajak yang rendah maka mereka akan terdorong untuk bertindak selaku *interpreneur*, dan dengan demikian akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Atau jika industri layanan umum dialihkan ke swasta maka industri-industri tersebut akan dikelola dengan lebih efisien dan mampu lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Ini pada akhirnya akan mengurangi beban pemerintah untuk membayar program kesejahteraan. (Budi Winarno, 2004: 90).

Pada 1975, di Amerika Serikat, Robert Nozick mengeluarkan tulisan berjudul “*Anarchy, State, and Utopia*”, yang dengan cerdas menyatakan kembali posisi kaum ultra minimalis, ultra libertarian sebagai retorika dari lembaga pengkajian universitas, yang kemudian disebut dengan istilah “Reaganomics”. Di Inggris, Keith Joseph menjadi arsitek “Thatcherisme”. Reaganomics atau Reaganisme menyebarkan retorika kebebasan yang dikaitkan dengan pemikiran Locke, sedangkan Thatcherisme mengaitkan dengan pemikiran liberal klasik Mill dan Smith. Walaupun sedikit berbeda, tetapi kesimpulan akhirnya sama: Intervensi negara harus berkurang dan semakin banyak berkurang sehingga individu akan lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang akhirnya disebut sebagai “Neoliberalisme”

(Triatmojo, 2006). Paham ekonomi neoliberal ini yang kemudian dikembangkan oleh teori gagasan ekonomi neoliberal yang telah disempurnakan oleh Mazhab Chicago yang dipelopori oleh Milton Friedman.

C. Filsafat Dasar Neoliberalisme dalam ekonomi.

Jantung dari gagasan ekonomi-politik "Neo-Liberalisme" adalah argumen bahwa pertumbuhan ekonomi akan optimal, jika dan hanya jika lalu-lintas barang atau jasa atau modal tidak dikontrol oleh regulasi apapun. Optimalisasi itu juga hanya akan terjadi bila digerakkan oleh konsep '*Homo Economics*', yaitu barang atau jasa atau modal dimiliki dan dikuasai oleh orang-perorang yang akan menggerakkannya untuk tujuan akumulasi laba pribadi sebesar-besarnya, sehingga "*Private Property*" pun menjadi absolut tanpa tanggung-jawab peran sosial apapun juga kecuali untuk akumulasi laba privat sebesar-besarnya. Dan keserakahan pun dimaklumkan sebagai sesuatu yang baik. Kalkulasi ekonomi ditempatkan sebagai satu-satunya kunci untuk mendekati semua masalah dan persoalan, maka terjadilah berbagai pemindahan regulasi dari lingkup arena sosial menjadi lingkup urusan personal saja. Apa yang semula dianggap sebagai masalah sosial yang merupakan persoalan negara dan membutuhkan kebijakan sosial atau *welfare system* -seperti kemiskinan, kekurangan gizi, pengangguran, dan sebagainya- kemudian dianggap

hanya menjadi masalah individual atau personal semata yang hanya membutuhkan kebijakan individual *self-care* saja.

Filsafat dasar ekonomi neoliberal sebagaimana yang dijelaskan oleh Herry Priyono (2003) dalam Wibowo dan Francis Wahono (2004: 54-55) adalah bahwa manusia pertama-tama dan terutama adalah *homo economicus* (manusia ekonomi). Itulah ontologi (kodrat) manusia. Gagasan ini mau mencapai dua hal:

- 1) Hubungan-hubungan antar pribadi dan social kita mesidipahami engan menggunakan konsep dan tolak ukur ekonomi. Jadi ontology *economicus* punya implikasi pada epistemology (cara pandang) *economicus* pula. Karena itu, kemacetan yang terjadi ataupun perubahan yang ingin dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan juga hanya bias dipahami dan didekati dengan konsep dan solusi ekonomi (sistem pasar).
- 2) Prinsip ekonomi juga merupakan tolok-ukur untuk mengevaluasi berbagai tindakan dan kebijakan pemerintah suatu Negara. Ontologi dan epistemologi *economicus* pada gilirannya melahirkan etika *economicus* pula. Jika liberalisme klasik abad 18 menuntut pemerintah-pemerintah untuk menghormati kinerja pasar sebagai salah satu cara jitu kehidupan ekonomi, neoliberalisme menuntut kinerja pasar bebas sebagai satu-satunya tolak ukur untuk menilai berhasil-tidaknya

semua kebijakan pemerintah. 'Pasar Bebas' adalah meja pengadilan bagi setiap kebijakan pemerintah.

Dalam konsep ini Robert H. Imam (2003) dalam Wibowo Wibowo dan Francis Wahono (2004: 303) menjelaskan bahwa manusia pertama-tama dipandang sebagai individu dengan preferensi rasional individual yang jelas. Masyarakat dipandang sebagai agregat dari individu-individu ini. Manusia pertama-tama dan terutama beroperasi atas motif ekonomis, atau lebih tepat lagi, menurut prinsip kapitalis. Motif-motif lain datang setelah dan diatur menurut prinsip ekonomi ini. Prinsip ekonomis, dengan begitu, memerintah diatas semua prinsip lain. Bergandengan dengan konsep *homo economicus* ini adalah kapitalisme, yang dipandang sebagai sistem paling pas untuk operasionalisasi konsep manusia seperti ini. Oleh karena individu pertama-tama dipahami sebagai *homo economicus*, maka maksimalisasi laba individual pula yang pertama-tama menjadi tujuan.

D. Kebijakan-kebijakan Neoliberal Dalam Rangka Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi dari Tinjauan Pendapatan

Paham neoliberalisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai hasil normal dari "kompetisi bebas" kompetisi yang agresif adalah akibat dari kepercayaan bahwa "pasar bebas" adalah cara yang efisien dan tepat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan

diharapkan keputusan individual atas interes pribadi diharapkan mendapatkan bimbingan dari *invisible hand* sehingga masyarakat akan mendapat berkah dari ribuan keputusan individual tersebut. Disamping itu, mereka juga percaya bahwa pertumbuhan ekonomi akan optimal jika, dan hanya jika, lalu lintas barang/jasa/modal tidak dikontrol oleh regulasi apapun yang pada akhirnya kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang tersebut akan *trickel down* kepada anggota masyarakat yang lain.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Triatmojo 2006), Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja sepenuhnya ini urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja.

Kalangan ekonom neoliberal dalam menafsirkan pasar bebas adalah sebuah landasan yang sesuai untuk mengubah perekonomian yang lebih baik, terwujudnya demokrasi, pengurangan kemiskinan, meningkatnya akumulasi modal dan kekayaan serta mendorong pesatnya pertumbuhan ekonomi. Argument ini terutama meluas dalam pembahasan mengenai kian terbukanya Eropa Tengah dan Eropa Timur terhadap pasar kapitalis. Keunggulan dengan penekanan pada ciri-ciri

mitos pasar kapitalis. Kebijakan penyesuaian struktural (*structural adjustment policy*) yang dianjurkan Bank Dunia dan organisasi-organisasi internasional lain juga mempunyai keyakinan kuat tentang kesan baik deregulasi dan perluasan pasar dari hambatan birokratisasi. Terdapat keyakinan umum yang meluas dalam keajaiban “kekuatan pasar” yang mampu membimbing ke arah kemakmuran dan kesejahteraan dengan tangannya yang tidak tampak (*invisible hands*). Hal ini diyakini oleh ahli-ahli ekonomi secara mutlak yang menciptakan teori bahwa pasar dapat menyelesaikan secara optimum masalah sumber dan faktor-faktor produksi. Baudrillard dalam Hans-Dear Evers (1997: 80) menyebut keadaan ini sebagai *the romanticism of productivity*.

Untuk itulah agar terjamin berlangsungnya pasar bebas yang dianggapnya akan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, maka segala rintangan yang menghalangi tercapainya pasar bebas harus disingkirkan karena akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Untuk itu diperlukan suatu tatanan perdagangan global, dan sejak itulah globalisasi dimunculkan. Dengan demikian globalisasi pada dasarnya berpijak pada kebangkitan kembali paham liberalisme, suatu paham yang dikenal sebagai neoliberalisme.

Apa yang menjadi pendirian neoliberalisme sesungguhnya ditandai dengan karakter sebagai berikut sebagaimana yang dijelaskan Chomsky (1999) dalam Mansour Fakih (2004: 7), : kebijakan pasar bebas

yang yang mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan pilihan konsumen berkembang, penghargaan atas tanggung jawab personal dan inisiatif kewiraswataan, serta menyingkirkan birokrat dan “parasit” pemerintah yang tidak akan pernah mampu bekerja dengan efektif dan efisien meskipun dikembangkan. Aturan dasar kaum neoliberal adalah, “liberalisasikan perdagangan dan keuangan, biarkan pasar menentukan harga, akhiri inflasi, (stabilisasi ekonomi-makro, dan privatisasi), dan pemerintah haruslah “menyingkir dari menghalangi jalan”. Paham inilah lanjutnya, yang saat ini mengglobal dengan mengembangkan “konsensus” yang dipaksakan yang dikenal dengan sebutan globalisasi, sehingga terciptalah tatanan dunia yang baru (*new world order*). Arsitek dari tata dunia ini adalah ditetapkan dalam apa yang dikenal sebagai “*the Neoliberal Washington Consensus*” yang terdiri dari para pembela ekonomi privat terutama wakil dari perusahaan-perusahaan besar yang mengontrol dan menguasai ekonomi internasional dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi informasi kebijakan dalam membentuk opini publik.

Istilah “*Washington Consensus*” sebagaimana yang dijelaskan oleh Tono Prasetiantono, pertama kali diperkenalkan oleh ekonom John Williamson dari *Institute for International Economics*, Washington D.C. konsep ini merupakan konsensus yang dihasilkan oleh ekonom-ekonom dari kubu konservatif dan liberal. Istilah “*Washington Consensus*”

digunakan Williamson, karena konsep ini merujuk pada hasil konsensus diantara para penggagasnya yang berada di kota Washington D.C., yakni dua lembaga multilateral (IMF dan Bank Dunia) beserta pemerintah Amerika Serikat, serta beberapa “tangkai pemikir” (*think tanks*) di kota itu. Konsep ini semula didesain sebagai upaya-upaya untuk menanggulangi krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Latin pada dasa warsa 1980-an dan 1990-an. Namun kemudian dirasa konsep ini cocok diterapkan di negara-negara berkembang lain yang menghadapi krisis yang kurang-lebih serupa. (Wibowo dan Francis Wahono, 2004: 119)

Lanjut Toni Prasetyantono, Pada dasarnya, “*Washington Consensus*” terdiri dari sepuluh elemen yang disarankan untuk diimplementasikan di negara-negara yang sedang mengalami krisis. *Pertama*, disiplin fiskal. Pemerintah disarankan untuk melakukan kebijakan fiskal yang konservatif, dimana defisit anggaran tidak boleh lebih dari dua persen dari GDP. *Kedua*, perlu adanya prioritas bagi pengeluaran publik (*public expenditure*) dalam anggaran pemerintah. Pemerintah harus berupaya untuk memperbaiki distribusi pendapatan melalui belanja pemerintah. *Ketiga*, reformasi pajak (*tax reform*). Pemerintah perlu memperluas pajak (*broaden the base*). Pajak merupakan komponen penting anggaran pemerintah, dan pemerintah perlu kreatif dalam pemungutannya, dengan cara perluasan basisnya. *Keempat*, liberalisasi finansial. Sektor finansial perlu didorong lebih liberal dan kian ketat bersaing, agar terjadi

peningkatan efisiensi. *kelima*, kebijakan nilai tukar yang memiliki kredibilitas, yang menjamin terdorongnya iklim persaingan. *keenam*, terus mendorong liberalisasi perdagangan, dengan cara menghilangkan restriksi-restriksi kualitatif (larangan-larangan) secara progresif. *ketujuh*, mendorong kompetisi antara perusahaan domestik dengan perusahaan asing, sehingga meningkatkan efisiensi. *kedelapan*, melakukan program privatisasi. *kesembilan*, iklim deregulasi harus didorong. Hambatan-hambatan atau restriksi-restriksi untuk masuk pasar harus dihilangkan, supaya pasar lebih kian kompetitif. Dan yang *kesepuluh*, pemerintah harus melindungi hak kekayaan intelektual (*intelektual property rights*), baik disektor formal maupun informal. (Wibowo dan Francis Wahono, 2004: 119-120).

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab awal bahwa siklus pertumbuhan ekonomi adalah berawal dari *income* seseorang maka untuk mengoptimalkan pendapatan agar dapat digunakan untuk menabung yang akhirnya akan membawa tingginya tingkat investasi yang pada akhirnya akan membawa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diperlukan kebijakan-kebijakan yang bisa mengarah kepada tingkat pendapatan yang tinggi. Dari hasil konsensus diatas dapat diringkas menjadi dua kebijakan bagaimana paham neoliberalisme mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan tinjauan pendapatan yaitu:

1. Liberalisasi

Dalam memahami fundamental gerak Neoliberalisme ini, B. Hery-Priyono secara lugas -- walaupun sekadar mengulang-ulang ulasan para ekonom -- berhasil melukiskan bentuk dasar liberalisasi yang notabene menjadi prinsip ekonomi kapitalisme. Dimulai dari liberalisme klasik, teori ekonomi-politik klasik menggagas produksi barang/jasa bergantung pada kaitan instristik antara tiga faktor: tanah (*land*), modal (*money/capital*), dan tenaga kerja (*labour*); teknologi adalah evolusi tenaga kerja. Di sini kemudian mundur apa yang kita kenal dengan teori *trias economica* dan konteks ini kita tarik dalam bingkai filosofis, kemudian manusia masuk dalam kategori makhluk *homo economicus* (manusia ekonomi). Dalam hubungan paling penting ini cara bertransaksi ekonomi (jual beli) bukan salah satu dari berbagai hubungan manusia, melainkan satu-satunya model yang mendasari tindakan dan relasi manusia, baik itu dalam hal hubungan keluarga, tata negara atau bahkan hubungan internasional. Dengan kerangka dasar (ontologi) ini menurutnya pada akhirnya pemahaman akan relasi sosial manusia harus memakai indikator ekonomi sistem pasar. "Jadi, ontologi *economicus* punya implikasi pada epistemologi (cara pandang) *economicus* pula."

Liberalisasi merupakan sebuah istilah populer yang pada dasarnya bermakna "kebebasan". Maka jika berbicara tentang

liberalisasi, kita perlu menjelaskan tentang pembebasan apa? Dan juga untuk kepentingan siapa?

Liberalisasi ekonomi sebagaimana yang dijelaskan oleh Ariel Heryanto dalam Kumala Hadi (1997: 361) dijelaskan bahwa liberalisasi ekonomi pada dasarnya merupakan pembebasan ruang gerak pemodal (kapitalis) dan permodalan (kapitalisme) dari berbagai rintangan yang selama ini menghadangnya. Beberapa rintangan misalnya campur tangan negara yang terlalu kuat, gerakan serikat buruh, radikalisme kiri yang populis, langkahnya sumberdaya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Juga masalah minoritas etnis, korupsi, proteksi, dan monopoli.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa paham neoliberal berkeyakinan bahwa optimalnya pertumbuhan ekonomi dapat dicapai sebagai hasil normal dari "kompetisi bebas". Maka liberalisasi atau pasar bebas menurut neoliberal adalah suatu keharusan agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas L. Friedman yang disebut sebagai pangeran Neoliberal dalam Coen Pontoh (2003: 13) bahwa, " semakin anda membiarkan kekuatan pasar berkuasa dan semakin anda membuka perekonomian anda bagi perdagangan bebas dan kompetisi, perekonomian anda akan semakin efisien dan berkembang pesat".

Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada pada tingginya tingkat penanaman modal (investasi) privat. Investasi pada gilirannya bergantung pada tingkat tabungan, dan tabungan tergantung pada tinggi-rendahnya penghasilan pribadi. Pertumbuhan pendapatan pribadi tergantung pada bekerjanya akumulasi laba yang hanya mungkin terjadi dalam perdagangan bebas. Yang diperjual-belikan bias barang, jasa, modal finansial, pengetahuan, ketrampilan, kecantikan, otot yang perdefinisinya akan menaikkan pendapatan. Kenaikan pendapatan membawa kenaikan tabungan yang kemudian membawa kenaikan investasi. Kenaikkan investasi inilah yang akan membawa pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya. Maka untuk memulai proses kenaikan pendapatan itu diperlukan suntikan modal, maka disinilah letak pentingnya kebijakan **liberalisasi-deregulasi** baik modal finansial, barang/jasa, tarif, maupun pajak. (Wibowo dan Francis Wahono, 2004: 60)

2. Deregulasi

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas argumennya Neoliberalisme bahwa pertumbuhan ekonomi akan optimal jika, dan hanya jika, lalu lintas barang/jasa/modal tidak dikontrol oleh regulasi apapun atau disebut **deregulasi**.

Bila diringkas, deregulasi menunjuk kebijakan pemerintah mengurangi/meniadakan aturan administratif yang mengekang

kebebasan gerak modal, barang, dan jasa. Dengan kebebasan gerak produksi, distribusi, dan konsumsi modal, barang, serta jasa itu, volume kegiatan bisnis swasta diharapkan melonjak. Deregulasi telah menjadi istilah teknis ekonomi dan populer karena alasan ekonomi. Akan tetapi, penciptaan istilah "deregulasi" ke bidang ekonomi itu sangat menyesatkan. Deregulasi pertama-tama bukan gagasan ekonomi, tetapi premis baru ketatanegaraan (Hery Priyono, 2005).

Dari pokok-pokok di atas mungkin segera tampak, de-regulasi bukan berarti tidakadanya regulasi, melainkan perluasan/pemindahan locus otoritas regulasi, yaitu dari state-regulation ke self-regulation. Maka, de-regulasi sesungguhnya berisi re-regulasi, dengan self sebagai aktor-regulator alternatif. Istilah "*self*" bisa berupa individu perorangan, bisa juga badan usaha bisnis/perusahaan, dan bisa pula pemerintahan lokal yang otonom.

Apa dasar *self* bertindak sebagai aktor-regulasi alternatif? Dasarnya adalah *self-determination* yang terungkap dalam kebebasan dan kedaulatan pilihan individual. Tetapi masih perlu dikejar lanjut. Kalau sumber daya pemerintah melakukan state-regulation adalah mandat, apa sumber daya self-regulation? Jawab: pemilikan/kontrol atas berbagai sumber daya (finansial, teknologis, fisik, informasi, material, dan sebagainya) yang diubah menjadi capital. Itulah

mengapa terjadi penerapan istilah "capital" pada bidang-bidang seperti budaya (cf cultural capital), pengetahuan (cf symbolic capital), dan lain-lain. (Hery Priyono, 2005)

Dengan itu deregulasi melahirkan gejala baru, yaitu kedaulatan dan kebebasan selera individual menjadi locus kekuatan regulatif baru yang tidak kalah menentukan dibanding kekuatan regulatif pemerintah. Modelnya adalah kinerja "kebebasan pilihan individual" dalam ekonomi pasar-bebas (cf "saya bebas berbuat apa pun menurut selera saya dan selera apa pun yang bisa saya beli"). Dalam arti tertentu bahkan bisa dibilang, pemerintah sering tinggal menjadi penjaga legalitas, tanpa sepenuhnya mampu menjadi regulator.

Oleh karena itu deregulasi dikatakan sebagai pengalihan negara dari peran penentu kebijakan (tapi bukan dari aktivitasnya sebagai pelayan kapital (William Robinson, 2003: 5). Atau bahkan Elizabeth Martinez dan Arnolando Garcia dalam Pontoh (2003: 101) mengatakan, deregulasi dalam kerangka neoliberal adalah menghapuskan peraturan-peraturan negara yang dapat mengurangi tingkat pengerukan keuntungan kaum kapitalis.

Sekali lagi, de-regulasi bukan penghapusan regulasi, tetapi re-regulasi menurut selera pribadi. Dengan itu kekuatan-regulatif penentu corak kehidupan publik bukan lagi hanya daya-regulatif

pemerintah, tetapi juga daya-regulatif kebebasan selera/pilihan individual.

Kedua kebijakan-kebijakan neoliberalisme tersebut diterapkan melalui lembaga-lembaga internasional yaitu Bank Dunia, IMF, dan WTO. Instrumen yang digunakan adalah SAPs (*Structural Adjustment Programs*) yang selalu dipaksakan oleh ketiga lembaga tersebut kepada anggota dan pasiennya. Diantara contoh beberapa persyaratan SAP sebagaimana yang dijelaskan oleh Jerry Mender, dkk., (2004, 10-11) Adalah:

1. Penghapusan tarif-tarif yang membantu industri-industri lokal agar tetap mampu bertahan hidup berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar global
2. Penghapusan berbagai peraturan dalam negeri yang mungkin dapat menghambat atau terlalu banyak mengatur masuknya investasi luar negeri.
3. Penghapusan kontrol harga (bahkan berkenaan dengan kebutuhan pokok seperti pangan dan air sekalipun), tetapi secara tidak adil mewajibkan pemberlakuan control atas upah.
4. Pengurangan secara drastis berbagai pelayanan sosial dan badan-badan yang menjalankannya.
5. Penghancuran secara agresif atas program-program rakyat.

6. Perubahan yang dipaksakan secara cepat atas perekonomian dalam negeri untuk menekankan produksi ekspor Menu-menu diatas harus dijalankan di setiap Negara yang menjadi pasien IMF maupun Bank Dunia termasuk Indonesia, dan juga harus dijalankan oleh Negara-negara yang menjadi anggota WTO

E. Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi

Sejak kebangkitan neoliberalisme atau yang disebut juga kelompok Kanan Baru Amerika Serikat dan Eropa yang kemenangannya mengambil momentum yang sangat tepat bersamaan dengan berlangsungnya proses globalisasi. Dengan perkembangan transportasi, teknologi komunikasi dan informasi sebagai katalisnya, globalisasi telah memarginalkan peran negara bangsa dalam proses pembangunan. Yaitu dari *state dominated* ke arah *market dominated*.

Sebelum kebangkitan neoliberalisme secara mengglobal, developmentalisme adalah paham yang memberi ruang kepada negara untuk sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Paham ini adalah sebagai model alternatif sejak terjadinya krisis liberalisme tahun 30-an. Negara, dalam paham ini, melalui perusahaan negara melakukan usaha untuk menyejahterakan rakyat. Kekuasaan negara untuk mengontrol sumberdaya alam dan ekonomi inilah yang digugat oleh paham neoliberalisme, yang memperjuangkan kembali berlakunya pasar bebas

dan mendesak negara untuk melepaskan kekuasaan mereka atas ekonomi, dan mereka menuntut agar membiarkan hukum pasar dan persaingan bebas yang mengaturnya.

Dengan kata lain ada perubahan dalam paradigma pembangunan sebagaimana yang dijelaskan oleh Budi Winarno (2004: 126) bahwa yaitu paradigma pembangunan yang semula adalah *state led-development* menjadi *market driven-development*. Yaitu yang semula negara menjadi kunci utama dalam proses pembangunan, dengan melakukan perencanaan dan menjadi aktor utama dalam proses pembangunan yang tengah dilakukan, bergeser ke paradigma bahwa negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan yang semuanya diserahkan ke pasar. Semakin negara turut campur dalam pasar hanya akan mendistorsi pasar dan membuat ekonomi tidak berjalan efektif dan efisien.

Kebijakan-kebijakan neoliberal dalam rangka mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dalam tinjauan pendapatan seperti yang dijelaskan diatas, yaitu liberalisasi, dan deregulasi adalah berusaha memangkas atau bahkan menghabisi peran pemerintah dalam pengelolaan ekonomi sampai tahap dimana otoritas legitim pemerintah untuk mengelola suatu negara habis dan semuanya diserahkan ke pasar. Perubahan ini sebagaimana yang dijelaskan Budi Winarno (2004: 145), telah bergaung pada tahun 1970-an yang dimulai di Inggris pada masa

Margaret Thatcher dan Di Amerika Serikat pada masa presiden Ronald Reagan. Di Inggris, perdana menteri Margaret Thatcher menjalankan kebijakan ini secara masif. Berbagai perusahaan diprivatisasi dan biaya-biaya kesejahteraan telah dipangkas habis yaitu pelayanan kesehatan, pendidikan, santunan pengangguran, dan pensiunan hari tua. Hal yang sama juga dilakukan di Amerika Serikat pada pemerintahan Reagan.

Dalam hal peran negara dalam pembangunan, kita perlu lagi melihat bangunan teori Adam Smith tentang peran negara, dia mengatakan “ menurut sistem kodrati, penguasa hanya mempunyai tiga tugas untuk dijalankan. Ketiga tugas ini sangat penting, tetapi jelas dan mampu dipahami oleh orang kebanyakan. Pertama, melindungi masyarakat dari kekarasan dan invasi masyarakat merdeka yang lainnya. Kedua, tugas melindungi, sebisa mungkin, setiap masyarakat dari ketidakadilan atau penindasan yang dilakukan oleh setiap anggota lain dari masyarakat tersebut, atau tugas menjamin pelaksanaan keadilan secara ketat. Dan ketiga, tugas membangun dan memelihara pekerjaan-pekerjaan umum tertentu dan pranata-pranata umum tertentu, yang tidak pernah orang atau sekelompok kecil orang berminat memvbangun dan memeliharanya.” (A. Sonny Keraf, 1996: 181)

Disamping tiga tugas peran negara diatas, ada tugas baru negara dalam pandangan neoliberal yaitu berupa pengembangan teknik-teknik mengontrol warga, tanpa negara harus bertanggung-jawab kepada

mereka. Karena dalam gagasan neoliberal, masyarakat merupakan kerumunan para wirausahawan yang otonom, masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, kekuarangan gizi, bukan lagi persoalan negara. Masalah tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing warga negara. Maka apa yang semula dianggap sebagai masalah sosial (kemiskinan, pengangguran, dsb) kemudian menjadi masalah individual. Solusinya bukanlah program sosial, melainkan *individual self-care* . itulah sebabnya mengapa program-program sosial dalam *welfare system* dianggap sebagai mubazir. (Wibowo dan Francis Wahono, 2004: 58)

Jadi dalam pandangan neoliberal negara hanya berperan sebagai penjaga malam. Atau yang lebih vulgar lagi adalah menjaga kepentingan para pengusaha dengan memaksakan negara harus melakukan liberalisasi, deregulasi dan privatisasi. Semua itu demi akumulasi modal individu.

F. Kebijakan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Tinjauan Pendapatan dalam Paham Neoliberal di Indonesia

1. Penerapan kebijakan Neoliberal di Indonesia

Sejak masuknya Indonesia menjadi anggota WTO tahun 1950-an, saat itulah Indonesia tidak lagi punya pilihan kebijakan, kebijakannya cuma satu yaitu liberalisasi ekonomi ke arah pasar bebas seturut resep yang diberikan WTO. Mulailah dengan kebijakan pertanian yang diterapkan setelah 1997 yang merupakan liberalisasi

pertanian untuk sepenuhnya diatur pasar bebas. Sejak tahun 1997 diterapkan liberalisasi pangan dan penyingkiran BULOG, liberalisasi pupuk lewat penyingkiran PUSRI, dan penghapusan tarif bea masuk pertanian hingga 0% (Bonnie setiawan dalam Wibowo dan Wahono, 2003: 98).

Secara parsial, penerapan neoliberalisme di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1980-an. Hal itu antara lain ditandai dengan dilakukannya kampanye besar deregulasi dan debirokratisasi pada pertengahan 1980-an, dimulainya liberalisasi keuangan tahun 1987, serta dimulainya pelaksanaan privatisasi BUMN pada awal tahun 1990-an (Revrison Baswir, 2006: 77). Walaupun demikian, pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara masif baru berlangsung setelah Indonesia mengalami krisis pada pertengahan tahun 1997. Menyusul keterlibatan IMF dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, pemerintah sejak itu secara resmi mengamalkan neoliberalisme sebagai jalan baru dalam mengelola ekonomi Indonesia.

Deregulasi dimulai dari sektor moneter (1 juni 1983) yang esensinya memberikan ruang gerak lebih bebas bagi perbankan berkiprah dalam mobilisasi dana baik penggalan maupun penyaluran kredit serta penentuan tingkat bunga. Deregulasi ini kemudian disusul dengan deregulasi fiskal yakni diundangkannya UU pajak yang baru (April 1984) serta program penghematan anggaran belanja. Dibidang

investasi meliputi diperbolehkannya investor asing 100% asal 95% produknya diekspor. (Nopirin dalam Kumala Hadi (ed), 1997: 112).

Deregulasi secara masif adalah dimotori oleh IMF yang mengajukan sejumlah syarat sebelum memberi bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk mengatasi *balance of payment*-nya. Dari banyak syarat itu, antara lain Indonesia harus menurunkan tarif impor, dan pembukaan sektor usaha bagi investasi asing. Di bidang pertanian, negara harus membuka impor pupuk maupun bibit pertanian, yang diiringi dengan privatisasi perusahaan pupuk. BULOG yang merupakan sarana campur negara di bidang pangan dilarang mengadakan monopoli Wibowo dan Wahono, 2003: 266).

Pasca krisis moneter, memasuki era reformasi, ternyata kebijakan ekonomi Indonesia semakin liberal. Dengan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF, Indonesia benar-benar telah menuju liberalisasi ekonomi. Hal itu paling tidak dapat diukur dari beberapa indikator sebagaimana yang dijelaskan oleh Dwi Condro T. (2005) adalah sebagai berikut:

1. Dihapuskannya berbagai subsidi pemerintah secara bertahap dan diserahkan harga barang-barang strategis ke mekanisme pasar.

2. Nilai Kurs Rupiah diambangkan secara bebas (*floating rate*) sesuai dengan kesepakatan LoI dengan pihak IMF, artinya harus dikembalikan pada mekanisme pasar.
3. Privatisasi BUMN, yaitu dengan menjualnya kepada pihak swasta, baik swasta nasional maupun swasta asing.
4. Peran serta pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian GATT, yang semakin memperjelas komitmen Indonesia untuk masuk dalam “kubangan” liberalisasi ekonomi dunia atau kapitalisme global.

2. Dampak Kebijakan Neoliberal Bagi Indonesia

Setidaknya ada tiga dampak ekonomi neoliberal bagi Indonesia yang ini semakin menyengsarakan rakyat Indonesia.

a) Dikuasainya sektor kepemilikan umum oleh swasta

Syarat-syarat adanya deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi yang ditekankan oleh aliran pendukung neoliberal yang sekarang menguasai perekonomian dunia.

Dalam masalah privatisasi John K. Gailbraith, seorang ekonom AS, dengan pedas mengancam privatisasi sebagai proses sistematis untuk memindahkan kekayaan dari tangan rakyat banyak ke tangan segelintir kaum berpunya. Jika dilihat dari sudut hubungan antara negara-negara miskin dengan negara-negara kaya,

privatisasi dapat dipastikan akan menyebabkan semakin terkonsentrasinya penguasaan aset dunia di tangan segelintir perusahaan multinasional (MNC), yang berasal dari negara-negara kaya tertentu. (Revrison Baswir, 2006: 140-141)

Secara gamblang Mansour Fakih (2003: 109) menjelaskan bahwa kebijakan privatisasi adalah kebijakan untuk melancarkan pasar bekerja secara mulus. Dengan demikian privatisasi perusahaan negara telah membawa akibat pada konsentrasi pemilikan kapital di tangan segelintir orang, sementara itu memaksa rakyat umum membayar lebih mahal atas kebutuhan dasar mereka. Dengan demikian golongan paling miskin dalam masyarakat akan menjadi korban dari kebijakan neoliberal ini. Kaum miskin harus memecahkan sendiri masalah mereka seperti masalah kesehatan, pendidikan, jaminan sosial serta masalah-masalah lainnya dengan usaha mereka sendiri. Tidak ada lagi perlindungan, maupun subsidi atas kebutuhan dasar mereka

Setelah tekanan untuk mengadakan aturan-aturan hukum yang mendukung pasar bebas, langkah selanjutnya adalah mendorong swastanisasi. Desakan swastanisasi perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) dengan segala dalih semakin menguat di Indonesia. Menurut debtWATCH-INFO (2002), dari 14 BUMN yang akan diswastakan, sangat terlihat bahwa yang

mendapat prioritas untuk diswastakan adalah BUMN yang menguntungkan, seperti PLN (untuk listrik), Angkasa Pura (pengola jasa banda udara), Telkom (komunikasi), PAM (air minum), BCA dan Bank Niaga (jasa perbankan), dan industri semen (semen padang, Semen Gresik, dan Semen Tonasa), yang luput dari proses swastanisasi di Indonesia adalah tidak adanya aturan yang baku sebagai batasan kerja, apalagi desain strategi swastanisasi yang transparan partisipatif dan akuntabel. Maka tidak aneh, jika setiap hari unjuk rasa anti swastanisasi terus berlangsung.

Tabel 4.2
Rencana pelaksanaan Privatisasi BUMN 1998 - 2003

No	BUMN	Bidang Usaha	Saham-saham Pemerintah (%)	Dijual (%)
1	Indo Farma	Farmasi	100	10-49
2	Pupuk Kaltim	Pupuk	100	10-49
3	Wisma Nusantara	Hotel	42	s.d 42
4	Kimia Farma	Farmasi	100	10-35
5	Sucofindo	Surveyor	95	15-20
6	PTPN II	Perkebunan	100	10-35
7	Sarinah	Ritel	100	s.d 100
8	Socfindo	Perkebunan	40	20-30
9	TBB Bukit Asam	Pertambangan	100	10-35
10	Krakatau Steel	Industri Baja	100	s.d 49
11	Bank Mandiri	Perbankan	100	s.d 35
12	Angkasa Pura II	Manajemen	100	s.d 49
13	Indocemen	Industri Semen	25	s.d 25
14	Semen Gresik	Industri Semen	51	-
15	Telkom	Industri	65	s.d 11
16	Indosat	Industri	65	s.d 11

Sumber: Dirjen Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan (I Wibowo 2004, 208)

Komite Privatisasi, melalui Keputusan No. KEP-03/M.EKON/01/2007 tanggal 31 Januari, menyetujui privatisasi terhadap sembilan BUMN mayoritas dan enam Perusahaan Kepemilikan Negara Minoritas. Hasil divestasi ke-15 perusahaan tersebut tidak semuanya digunakan untuk menutup defisit APBN. Hasil privatisasi yang masuk ke saku negara diharapkan terutama dari divestasi saham BNI serta divestasi seluruh saham minoritas pemerintah yang tersisa di enam perusahaan. Hasil divestasi lainnya yang masuk ke kantong APBN adalah dari penjualan seluruh saham pemerintah di PT Industri Soda Indonesia (100 persen), PT Industri Gelas (63,82 persen), dan PT Cambrics Primmissima (52,79 persen). Untuk PT Jasa Marga, PT Wijaya Karya, PT PNM, PT Garuda Indonesia, dan PT Merpati Nusantara Airlines, digunakan untuk memperkuat struktur permodalan, pengembangan, dan penyehatan perusahaan. (Eddy Jusuf, 2007)

Sebagai contoh, dibidang kehutanan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sabirin (1994) dalam Dwi Condro T. (2005). Sejarah industri perkayuan berawal dari pemberian Hak Penguasaan Hutan (HPH). Ditandai dengan keluarnya PP N0. 21 Tahun 1970 tentang Hak Atas Penguasaan Hutan (HPH) dan Hak Atas Pemungutan Hasil Hutan (HPHH). Dengan luas hutan saat itu sangat menjanjikan pada waktu itu, yaitu 143,7 juta hektar atau

sekitar 76% luas daratan Indonesia, pemerintah berharap pemberian HPH tersebut dapat menopang pembangunan Indonesia. Namun menurut laporan Walhi yang diterbitkan tahun 1993, rata-rata hasil eksploitasi hutan di Indonesia setiap tahunnya adalah 2,5 US\$ miliar. Dari hasil itu yang masuk ke kas negara hanya 17%, sedangkan sisanya sebesar 83% masuk ke kantong pengusaha HPH.

b) Terjebak Perangkap Utang

Menurut teori ekonomi makro klasik, utang pemerintah (terutama utang luar negeri merupakan kontributor vital terhadap pertumbuhan ekonomi. Argumennya, kalau pembangunan ekonomi saat ini tidak dibiayai oleh utang luar negeri, maka sumber dana harus diambilkan dari dalam negeri. Artinya, masyarakat harus membayar pajak yang lebih tinggi, sehingga pendapatan mereka merosot. Ini akan mengurangi konsumsi, dan karena konsumsi domestik memiliki kontribusi diatas 50% dalam pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhanpun akan menjadi terhambat (Drajat H. Wibowo, 2002: 18).

Argumen inilah yang mendasari para ekonom Indonesia untuk mengadopsi mentah-mentah manajemen utang secara klasik, sesuai dengan resep Bank Dunia dan IMF. Bagi mereka, negara

yang memiliki utang tinggi sebaiknya menambah utang lagi sehingga pertumbuhannya meningkat.

Padahal akhir-akhir ini kita telah mendengar kesaksian dari Jhon Perkins, seorang *economic hit man* (perusak ekonomi) yang mendapat tugas dari perusahaan-besar Amerika untuk memberikan utang kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Utang yang disalurkan oleh perusahaan-perusahaan raksasa dunia ke Indonesia atau lembaga-lembaga finansial internasional seperti IMF, hanyalah sebuah rekayasa Jhon Perkins dan teman-temannya.

Jhon Perkins mengatakan dalam kesaksiaanya, “saya mempunyai dua tujuan penting. Pertama, saya arus membenarkan (*justify*) kredit dari dunia internasional yang sangat besar jumlahnya, yang akan disalurkan melalui MAIN dan perusahaan AS lainnya (seperti Bechtel, Halliburton, Stone & Webster) melalui proyek engineering dan konstruksi raksasa. Kedua, saya harus bekerja untuk membangkrutkan negara-negara penerima pinjaman raksasa tersebut (tentu setelah mereka membayar MAIN dan kontraktor AS lainnya), sehingga mereka untuk selamanya akan dicengkeram (*beholden*) oleh para kreditornya. Dengan demikian, negara-negara penerima utang itu akan menjadi target yang mudah ketika kita memerlukan yang kita kehendaki (*favours*), seperti

pangkalan militer, suaranya di PBB, atau akses pada minyak dan sumber daya alam lainnya)." (Jhon Perkins, 2005: 13).

Lebih lanjut dalam kesaksiannya yaitu Faktor yang kritis dalam semua kasus adalah Produk Domestik Bruto. Proyek-poyek yang berdampak pada PDB yang tertinggi harus dimenangkan. Kalau pun hanya satu proyek yang menjadi pertimbangan, saya harus mampu menunjukkan (*demonstrate*) bahwa pembangunannya akan menghasilkan GNP yang superior. Tujuan membangun proyek-proyek tersebut ialah menciptakan laba sangat besar untuk para kontraktornya, dan membuat bahagia sekelompok kecil elit dari bangsa penerima utang luar negeri, sambil memastikan ketergantungan keuangan yang langgeng (*long term*). Dan karena itu menciptakan kesetiaan politik dari negara-negara target di dunia." (Jhon Perkins, 2005: 17-18). Satu orang yang memenangkan pembangunan perusahaan uility, meski mayoritas rakyatnya disengsarakan oleh utang pemerintahnya. Dari segi statistik, ini akan tercatat sebagai kemajuan ekonomi.

Utang luar negeri Indonesia pada sampai september 2000 total utang luar negeri sebagaimana yang dilaporkan debt WATCH-INFO (2002), mencapai US\$ 149, 903 juta (149 ribu trilliun). Jumlah diatas terbagi dalam utang swasta (US\$ 85,608

juta) dan uang publik (US\$ 55,195 juta). Tabel 2 berikut menunjukkan tren beban utang luar negeri Indonesia.

Tabel 4.3
Utang Luar Negeri Indonesia (dalam juta US\$)

	Desember 1999	September 2002
Total Utang Luar Negeri	148.097	149.903
A. Sektor Publik	86.409	85.608
1. Pemerintah	75.862	75
2. Bank Pemerintah	4.717	407
3. Bumh	5.831	4.408
B. Sektor Swasta	61.688	5.793
1. Bank Swasta	6.132	55.795
2. Perusahaan Swasta	55.556	4.986
		50.209

Sumber: Bank Indonesia dalam debt WATCH-INFO No. 4 - 2002

Pada tahun 2006, pemerintah harus merogoh Rp 91,60 triliun untuk membayar utang luar negeri. Dengan perincian Rp 28,01 triliun untuk pembayaran bunga dan utang pokok sebesar Rp 63,59 triliun. Total utang Indonesia sendiri telah mencapai Rp 1.200 triliun, terdiri utang luar negeri dan utang dalam negeri. Dari jumlah Rp 600 triliun utang luar negeri, separuhnya berasal dari Jepang. Kewajiban membayar Rp 91,60 triliun yang sudah harus disetor sekitar Desember 2006 itu sama dengan 15,26 persen total utang luar negeri. Atau setara dengan 15 persen total penerimaan APBN 2006. Postur utang yang demikian, praktis membuat pemerintah hanya mampu menganggarkan dana untuk pendidikan sebesar 19,05 persen dari beban utang, sedangkan anggaran untuk

kesehatan hanya 6,96 persen dari beban utang. (Moh. Samsul arifin, 2006).

c) Semakin lebarnya kesenjangan ekonomi

Pemerintah telah gagal dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan ini sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan sejumlah agenda yang memiskinkan, seperti pengurangan subsidi, liberalisasi sektor keuangan dan perdagangan, dan privatisasi. (Revrisond Baswir, 2006: 100)

Dampak dari pembangunan ekonomi yang bercorak liberalistik yang paling menyakitkan adalah terjadinya kesenjangan ekonomi yang luar biasa antara para pemodal dengan rakyat miskin. Kita masih ingat bagaimana subsidi BBM di cabut dan akhirnya pemerintah menaikkan harga BBM hampir 120 %. Kenaikan harga BBM ini sesungguhnya tidak murni kehendak dari pemerintah, tetapi ini cerminan ketidakberdayaan negara menghadapi situasi ekonomi internasional pasar bebas. Karena kenaikan demi kenaikan harga BBM di Indonesia merupakan hasil dari kesepakatan pertemuan antara wakil pemerintah Indonesia dengan IMF.

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar

39,05 juta (17,75 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97 persen), berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta (*Berita Resmi Statistik No. 47 / IX / 1 September 2006*). Sedangkan pada tahun 1993, omset dari 14 konglomerat Indonesia terbesar yang tergabung dalam Group Prasetya Mulya, diantaranya Om liem (Salim Group), Ciputra (Ciputra Group), Mochtar Riadi (Lippo Group), Suhargo Hondokusumo (Darmala Group), Eka Tcipta (Sinar Mas Group) mencapai 47,2 Triliun rupiah atau 83% APBN Indonesia saat itu. (Dwi Condro T., 2005)

Demikianlah dampak yang diakibatkan kebijakan ekonomi neoliberalisme di Indonesia, bagaimanapun juga tetap yang menang adalah para pemodal dan rakyat yang miskin harus menyelesaikan masalah mereka sendiri karena dalam negara atau Pemerintah sudah menjadi pelayan para pemodal dan tidak memihak pada rakyat banyak.

BAB V

PANDANGAN ISLAM ATAS OPTIMALISASI PERTUMBUHAN EKONOMI TINJAUAN PENDAPATAN DALAM PAHAM NEOLIBERAL

A. Filsafat dan Nilai Dasar Ekonomi Islam

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, filsafat dasar ekonomi neoliberal adalah *homo economic* dimana kodrat manusia adalah sebagai manusia ekonomi yang bebas melakukan kehendaknya untuk memuaskan dirinya. Filasafat neoliberal dengan *homo economic*-nya tergambar pada prinsip *laissez faire*. Filsafat ini yang selanjutnya akan membawa manusia kepada kehidupan yang materialistis karena kebebasan orang hanya semata-mata untuk mengeruk kekayaan bagi dirinya sendiri.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Chapra,, bahwa manusia ekonomi atau *homo economic* inilah satu-satunya muara bagi seluruh gerakannya. Semua tindakan sesuai dengan apa yang disebut sebagai “mesin nilai guna” dan “kepentingan sendiri”. Satu-satunya tanggung jawab sosial adalah menurut Fridmen sang pangeran Neoliberal, yang dikutip oleh Capra adalah “bagaimana meningkatkan keuntungannya” (2000: 29)

Filasafat dasar ekonomi dalam Islam adalah berasaskan kepada konsep tauhid, yang pokok doktrinnya sebagai berikut:

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ... اللَّهُ... ﴿٣٨﴾

"Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". (Azzumar: 38)

Konsep tauhid inilah yang disebut Ihyaul Ulum (2002: 23) sebagai "Tauhid Ekonomi", yaitu pemikiran yang menyandarkan diri pada nilai-nilai ke-Tuhan-an dalam upaya penerapan syariat Islam di bidang ekonomi, termasuk juga dalam rangka mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dalam pandangan Islam. Konsep tauhid ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Naqvi (2003: 35), merupakan titik sentral etika Islam, yaitu menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan.

Sebagaimana yang disebutkan Adi Sasono (1998: 36-38) diatas, ada tiga orientasi dasar filsafat ilmu ekonomi yang berpangkal kepada asas tauhid ini yaitu; *pertama*, Dunia ini, semua harta dan kekayaan adalah milik Allah dan menurut kepada kehendak-Nya. Manusia sebagai khalifah-Nya hanya mempunyai hak khilafat dan tidak absolut serta dengan melaksanakan hukum-Nya; dan mereka yang menyatakan kepemilikan eksklusif tidak terbatas berarti ingkar kepada kekuasaan Allah. *Kedua*, Allah itu Esa, Pencipta segala makhluk, dan semua yang diciptakan tunduk kepada-Nya. Salah satu hasil ciptaan-Nya adalah manusia yang berasal dari substansi yang sama, dan memiliki hak dan

kewajiban yang samasebagai khalifah Allah di muka bumi. Alam ini, semua flora dan fauna ditundukkan oleh Allah sebagai sumber manfaat ekonomis dan keindahan bagi umat manusia. Sedangkan ketidakmerataan karunia ni'mat dan kekayaan sumber-sumber ekonomi kepada perorangan maupu bangsa adalah kuasa Allah pula, agar mereka yang diberi kelebihan sadar menegakkan persamaan masyarakat (egalitarian) dan bersyukur kepada-Nya. Dan *ketiga*, Iman kepada Hari Pengadilan sebagai asas ketiga sangat penting dalam filsafat ekonomi dalam Islam, karena akan mempengaruhi tingkah laku ekonomi manusia. Seorang muslim yang melakukan aksi ekonomi tertentu akan mempertimbangkan akibatnya pada hari kemudian.

Sedangkan nilai dasar yang mendasari prilaku ekonomi dalam Islam adalah keberpihakannya terhadap nilai *etik-religius*. Berbeda dengan neoliberalisme yang mendasari prilaku ekonomi dengan kebebasan individu yang mutlak yang menghilangkan nilai-nilai agama sehingga mengakibatkan rusaknya tatanan sosial serta bertentangan derngasn aspek moralitas. Nilai-nilai etik Islam inilah yang dijadikan acuan dalam merumuskan prilaku ekonomi.

Menurut Naqvi, nilai-nilai etik Islam ini harus ditransformasikan dalam seperangkat aksioma yang mengatur hubungan manusia dengan

dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya. Aksioma-aksioma etik dalam pandangan Naqvi diantaranya adalah:

1. Kesatuan (*Tauhid*); sumber utama etika Islam adalah kepercayaan penuh terhadap kesatuan Tuhan. Ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam yang menghubungkan institusi sosial-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan Dzat yang sempurna dan tak terbatas. Hubungan ini dipengaruhi oleh penyerahan tanpa syarat manusia dihadapan-Nya, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada perintah-Nya. Ini dikuatkan dengan dalil al-Qur'an:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

"Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam". (QS. 6:162)

2. Keseimbangan/Kesejajaran; prinsip kesejajaran dalam ekonomi adalah menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi, serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat,

..... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴿٧﴾

"supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu". (QS. 59, 7)

3. Kehendak Bebas (*Ikhtiyar*), dalam pandangan Islam manusia terlahir memiliki 'kehendak bebas' yakni dengan potensinya menentukan pilihan-pilihan yang beragam termasuk mengambil pilihan yang salah, hanya untuk kebaikan diri manusia sendirilah pilihan 'yang benar': Hanya manusia yang yang mentaati ketentuan Tuhanlah yang mempunyai pilihan yang benar:

قُلْ يَتَّيِبُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

Katakanlah:"Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran (Al Quran) dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk Maka Sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. dan barangsiapa yang sesat, Maka Sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. dan Aku bukanlah seorang Penjaga terhadap dirimu". (QS. 10: 108).

4. Tanggung Jawab (*Fardh*), dalam Islam, manusia bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat khususnya peningkatan kesejahteraan anggota masyarakat yang kurang beruntung. Tanggung jawab ini menyatu dengan statusnya sebagai wakil Tuhan di bumi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa

saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
(QS. 3, 92).

Karena prinsip tanggung jawab ini berkaitan dengan kehendak bebas manusia, maka dengan demikian manusia dapat melindungi kebebasannya sendiri dari ketamakan dan kerakusan dengan melaksanakan tanggung-jawabnya terhadap orang miskin dalam masyarakat. (Naqvi, 2003: 37-49)

B. Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam

Dalam ideologi neoliberal, pembangunan ekonomi yang bertumpuh pada pertumbuhan akan membawa manfaat yang lebih luas kepada seluruh masyarakat dengan dalih *trickle down effect*-nya. Mereka percaya bahwa dengan mempersiapkan modal yang lebih besar suatu saat nanti sampai tingkat tertentu, diduga bahwa manfaat-manfaat akan terbagi secara lebih merata, karena jatah ekonomi akan semakin besar maka akhirnya kelas bawah akan memperoleh bagian jatah yang tidak hanya lebih besar tetapi juga akan jauh lebih berkecukupan.

Puncak dari kebijakan neoliberal terhadap pembangunan ekonomi sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Shiddiq Al Jawi (2005) adalah terangkum pada bagaimana ekonomi kapitalisme memberikan indikator bagi tingkat kesejahteraan masyarakat di sebuah negara, dengan mengukur pada tingkat produksi rata-rata dari jumlah penduduk secara

nasional (atau domestik) per tahun, yang biasa dikenal dengan GNP ataupun GDP. Dengan suatu anggapan bahwa jika GNP naik maka pembangunan di negara itu sukses dan rakyatnya semakin sejahtera. Hal ini akan mendorong penguasanya untuk selalu memacu dan memacu tingkat produksi secara nasional saja, tanpa melihat lagi satu persatu individu rakyatnya apakah sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya atau belum. Karena angka tersebut hanyalah angka rata-rata. Sangat mungkin terjadi ketika segelintir orang penghasilannya meningkat tajam sementara sebagian besar yang lain turun, akan memberikan nilai GNP yang meningkat.

Berger (2004: 54-55) dalam kritiknya terhadap model pertumbuhan kapitalisme berpendapat, bahwa pembangunan ekonomi yang bertumpuh pada pertumbuhan adalah hanya sebuah mitos yang harus dibongkar kepalsuannya. Menurut dia pembuktian adanya *trickle down effect* tidak dapat dibenarkan karena pembuktiannya tergantung pada masa depan yang tidak dapat didekati secara empiris. Di banyak negara Dunia Ketiga, polarisasi dalam pembagian pendapatan dan kekayaan semakin meningkat. Artinya, kalau proses itu berjalan, maka kelas-kelas bawah memperoleh semakin sedikit dan bukannya semakin banyak. Begitu pula kondisi mutlak mereka juga tidak mengalami perbaikan, bahkan dewasa ini lebih banyak kelaparan dan lebih banyak penyakit dari pada beberapa

dasawarsa yang lalu, begitupula pengangguran juga semakin meningkat secara luas.

Dengan demikian jelas bahwa pembangunan ekonomi neoliberalisme yang bertumpuh pada pertumbuhan, membantu bertambahnya ketimpangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena hanya satu pilihan yang dijadikan alternatif kegagalan neoliberalisme dalam memberikan kesejahteraan manusia seutuhnya yaitu ekonomi yang berlandaskan Islam.

1. Konsep Islam dalam pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam teori sebagaimana yang dijelaskan pada bab-bab terdahulu adalah meningkatnya produktifitas ekonomi secara keseluruhan maupun para pekerja rata-rata dan juga meningkatnya perbandingan antara pendapatan dengan total jumlah penduduk. Biasanya dihitung dengan dalam istilah per kapita dan membentang dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan dalam Islam melihat pembangunan menurut pengertian yang luas dan menyeluruh dengan menekankan pembangunan insan atau manusia seutuhnya. Puncaknya adalah kehidupan yang seindah-indahnya.

Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya sebagian dari persoalan yang lebih besar,

yaitu pembangunan ummat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Khurshid (1997) dalam (Ainur R. Sophiaan (ed.), 1997: 13), bahwa fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang terkait dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan ummat manusia secara keseluruhan. Diantara Dasar-dasar filosofis pembangunan Islami adalah sebagai berikut:

1. *Tauhid*, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah-manusia dan manusia dengan sesamanya.
2. *Rububiyah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam.
3. *Khilafah*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah dimuka bumi ini. Pertanggungjawaban ini menyangkut manusia sebagai Muslim maupun sebagai anggota dari ummat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi, serta prinsip-prinsip organisasi sosial.
4. *Tazkiyah*, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat dan Negara.

Konsep Islam tentang pembangunan ekonomi sebagaimana yang dikatakan oleh Manan (1993: 379), adalah lebih luas daripada konsep

ekonomi sekular. Walaupun dasar pembangunan ekonomi Islami adalah multidimensional (yaitu mempunyai dimensi-dimensi moral, sosial, politik dan ekonomi), namun sejak awal, pembangunan moral dan spritual sudah terintegrasi dalam pembangunan ekonominya. Inilah yang dinamakan “*Tazkiyah al Nafs*”. Jadi konsep pembangunan Islami sebenarnya dapat ditarik dari konsep tazkiyah sebagaimana yang dikatakan Khurshid (Ainur R. Sophiaan (ed.), 1997: 13), berarti penyucian terhadap sikap dan hubungan tersebut dimuka bumi. Hasil dari *tazkiyah* adalah *falah*, yaitu sukses di dunia maupun di akherat sebagaimana yang dikatakan dalam al-Qur’an:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَهْمَهَا جُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن
زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), .Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (Q.S., 91: 7-10).

Justru karena yang dituju adalah penyucian jiwa (*at-tazkiyah*), Islam melihat manusia sebagai sentral atau fokus pembangunan, terutama pada penyempurnaan akhlak dan kepribadian. Dasar inilah sebagaimana yang ditekankan oleh Anwar Ibrahim (1997) dalam Ainur R. Sophiaan (ed.), (1997: 64) yang harus mewarnai semua aspek pembangunan lainnya, dimana kita dapat mempersiapkan landasan kemajuan peradaban

mendatang dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Jadi pembangunan ekonomi dalam Islam bukan hanya pembangunan material, tapi segi spritual dan moral pun mempunyai kedudukan yang sangat penting. Penekanan pertumbuhan hanya dari segi material tidaklah dapat menguasai luasnya kesenjangan dalam pembagian pendapatan karena dalam Islam yang ditekankan adalah keadilan distributif.

Pembangunan ekonomi dalam pandangan Islam tidaklah untuk dirinya sendiri, tidak pula peningkatan GNP (pendapatan nasional kotor) merupakan satu-satunya ukuran "pertumbuhan ekonomi" menurut Islam. Tujuannya adalah suatu hidup sejahtera dengan segala dimensinya, dan aspek ekonomi hanyalah salah satu dimensi. (M.N. Siddiqi, 1986: 26). Kesejahteraan ini meliputi fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu memaksimalkan *output* total semata-mata tidak dapat menjadi tujuan dari sebuah masyarakat muslim. Memaksimalkan *output*, harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditujukan kepada kesehatan rohani yang terletak pada batin manusia, keadilan serta permainan yang *fair* pada semua peringkat interaksi manusia. Hanya

pembangunan semacam inilah yang selaras dengan tujuan-tujuan syari'ah (*maqashid as-syari'ah*). (Umar Chapra, 2000: 8).

2. Model Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam

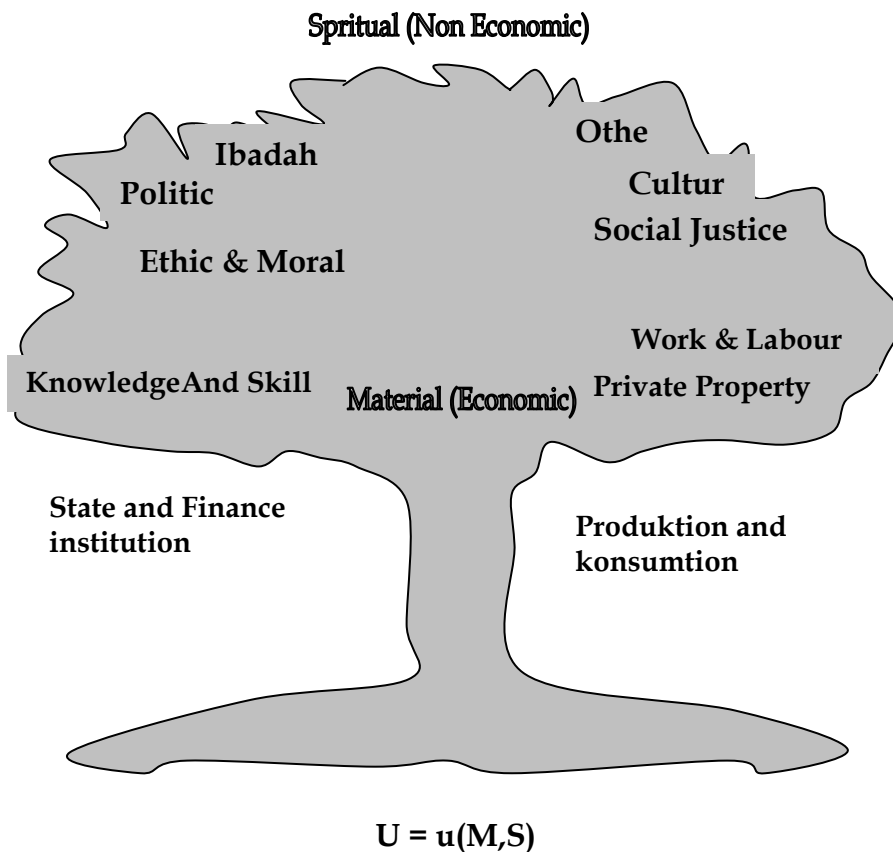
Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran penting dalam ekonomi Islam, sanksi islam berlaku pada semua kebijakan pertumbuhan yang bisa mengakibatkan munculnya ketimpangan yang berlebihan dalam distribusi pendapatan. Hal pokok yang perlu dicatat, sebagaimana yang dikatakan oleh Naqvi (2003:, 150), dari sudut pandang Islam, pertumbuhan ekonomi tidak harus menyebabkan aliran sumber-sumber riil yang jahat dari orang miskin kepada orang kaya; pertumbuhan ekonomi tersebut juga tidak harus melanggar persyaratan-persyaratan kesejajaran antar generasi. Sebaliknya, kepentingan-kepentingan generasi mendatang harus diperhatikan. Harus juga dipahami bahwa keadilan distributif, yang tidak bisa tidak melibatkan situasi-situasi konflik antara 'kalangan berpunya' dengan 'kalangan tak berpunya' dapat dijalankan dengan baik dalam suatu ekonomi yang tumbuh kuat dari pada ekonomi yang tumbuh lambat atau stagnan.

Menurut Manan banyak faktor pertumbuhan ekonomi tetapi yang lebih penting adalah perilaku manusia dan sumber daya alam (1993: 380). Oleh karena itu ada dua kebijakan dalam mengoptimalkan pertumbuhan

ekonomi yang ditawarkan oleh Naqvi yaitu; *pertama*, sepanjang kemajuan teknologi tergantung pada pendidikan dan kesehatan yang lebih tinggi – dalam pengembangan sumberdaya manusia – maka anggaran belanja untuk itu harus diperhatikan sungguh-sungguh. *Kedua*, semua kebijakan yang memperhitungkan bahaya kerusakan alam akibat pertumbuhan ekonomi harus diimplementasikan untuk mewujudkan keseimbangan yang lebih baik antara manusia dan alam. (2003: 151),

Satu perbedaan yang jelas antara dua sistem yang masih ada sosialis maupun kapitalis menurut Syafiq (2005: 92) adalah ekonomi modern yang mengkaji ‘manusia dalam bisnis rutinitas’, dan ekonomi Islam yang mengkaji perilaku individu yang berdasarkan etika, nilai, dan moral. Manusia Islami atau pantas (*The Islamic or Reasonable Man*) memaksimalkan kepuasannya (*maslahat*) seperti halnya Manusia Ekonomi atau Manusia Rasional (*Economic or Rational Man*), tidak sekedar mengkonsumsi barang-barang materi dan peralatan, tetapi juga obligasi spritual. Jadi fungsi maslahat (*utility*) individu dalam diktat Islam menjadi $U = u(M,S)$. Dimana M merepresentasikan konsumsi semua barang-barang materi dan peralatan, sedangkan S, dalah semua aktivitas spritual, yang mayoritasnya tidak berhubungan dengan uang. (lihat gambar model pertumbuhan ekonomi dibawah ini)

Gambar 5.1
Model Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam



M = Knowledge and Skill, State & Finance, Institution, Private Property, Work and Labour, production and Consumption
SS = Ethics & Moral, Social Justice, Politics, Culture, Ibadah, and Others.

Sumber : Salem subrata dalam Syafiq A. Alvi dan Amer al-Roubaie (Majalah ISLAMIA April-juni 2005)

3. Peran Negara Dalam Pembangunan Ekonomi

Segala macam campur tangan negara (*intervention*) negara yang bermacam-macam dikritik oleh para ekonom yang beraliran neo-klasik atau yang disebut juga neoliberal. Menurut mereka mekanisme pasar (*market mechanism*) pada dasarnya sudah cukup untuk menggerakkan

roda ekonomi, atau bahwa *invisible hand* cukup membuat lancar produksi, distribusi maupun konsumsi. Setiap campur negara hanya akan membuat distorsi. (Wibowo, 2004: 275). Oleh sebab karena harga menjadi tanda apa yang diproduksi. Jika harga murah, berarti persediaan memadai. Sebaliknya, jika harga mahal, berarti produknya mulai langka. Dalam keadaan harga tinggi, orang akan menanamkan modal ke sana. Itulah alasannya, mengapa negara tidak perlu campur tangan; serahkan saja pada mekanisme dan hukum pasar untuk berkerja. Inilah keyakinan penganut ekonomi neo-liberal yang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai hasil normal dari kompetisi bebas.

Chapra (1997) menjelaskan bahwa kekuatan-kekuatan pasar yang menyesatkan tidak akan menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi seluruh strata masyarakat, serta tidak akan menumbuhkan efisiensi yang optimal dari penggunaan sumber daya karena terbatasnya wawasan pribadi, kurangnya kesadaran atau apresiasi biaya sosial, serta ketimpangan dalam beberapa sektor ekonomi yang berbeda. Karena itulah pemerintah harus berusaha merencanakan serta memainkan peranan aktif untuk merealisasikan rencana tersebut. (Ainur R. Sophiaan (ed.), 1997: 36-37)

Sedangkan M. Arif Adiningrat dan Farid Wadjdi, (2005) mengatakan bahawa dalam Islam negara memiliki peran yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan

tiap individu rakyatnya; termasuk pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan keamanan. Ini merupakan *policy* mendasar ekonomi Islam. Bisa jadi seorang individu tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan berbagai alasan seperti cacat tubuhnya atau lemah akalnya, sementara keluarganya tidak cukup untuk membantu. Di samping itu, negara (Daulah Khilafah Islam) harus berperan untuk menjamin pendistribusian kekayaan berdasarkan syariah seperti: memungut dan membagikan zakat; melarang penimbunan kekayaan, investasi pada bank ribawi untuk mendapatkan keuntungan dari bunga, penimbunan emas dan perak, penimbunan barang yang mengancam kewajaran harga pasar, pemilikan harta milik umum oleh individu/swasta, dan sebagainya. Negara juga bertanggung jawab untuk mengelola kepemilikan umum (*milkiyah 'âmah*) untuk kepentingan rakyat banyak, memanfaatkan sumber-sumber pendapatan negara untuk rakyat, menciptakan situasi perekonomian yang kondusif seperti keluasan lapangan kerja dan kemampuan yang tinggi dari para pekerja (profesionalitas).

C. Pandangan Islam Terhadap Kebijakan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Paham Neoliberal dengan Tinjauan Pendapatan

Secara ideologis Islam dan Neoliberalisme bertolak belakang. Islam menjadikan akidah Islam berikut syariatnya sebagai landasan sistem

ekonominya. Sebaliknya, dasar sistem ekonomi Neoliberalisme adalah sekularisme, yang menghalangi agama terlibat dalam ekonomi. Akibatnya, kebijakan ekonomi neoliberal lebih didasarkan pada hawa nafsu manusia yang rakus. Lalu bagaimana pandangan dan solusi Islam terhadap kebijakan ekonomi neo-liberal ini?

1. Liberalisasi Perspektif Islam

Komponen paling penting dari liberalisasi atau pasar bebas neoliberal adalah terkandung dalam program penyesuaian atau SAPs (*Structural Adjustment Programs*) yang selalu dipaksakan oleh neoliberal. Diantara contoh beberapa persyaratan SAP sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu; Penghapusan tarif-tarif yang membantu industri-industri lokal agar tetap mampu bertahan hidup berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar global, Penghapusan berbagai peraturan dalam negeri yang mungkin dapat menghambat atau terlalu banyak mengatur masuknya investasi luar negeri, Penghapusan kontrol harga (bahkan berkenaan dengan kebutuhan pokok seperti pangan dan air sekalipun), tetapi secara tidak adil mewajibkan pemberlakuan kontrol atas upah, Pengurangan secara drastis berbagai pelayanan sosial dan badan-badan yang menjalankannya, Penghancuran secara agresif atas program-program rakyat, dan Perubahan yang dipaksakan secara cepat atas perekonomian dalam negeri untuk menekankan produksi ekspor. Ini

dipertegas lagi oleh Chapra (2000: 56), komponen yang paling penting dalam program penyesuaian liberalisasi adalah; mengurangi peran pemerintah dalam ekonomi, membiarkan pasar melakukan perannya, dan membebaskan perdagangan luar negeri. Perlu dicatat bahwa SAPs ini adalah program yang dipaksakan tanpa melihat perbedaan struktur, perkembangan ekonomi, dan ketimpangan kemampuan sains dan teknologi suatu negara.

Karena ekonomi neoliberal percaya bahwa persoalan ekonomi terletak pada masalah produksi. Maksudnya, persoalan ekonomi terletak pada tidak terbatasnya keinginan manusia, sementara sumberdaya yang diperlukan untuk memenuhinya terbatas. Untuk menghilangkan gap ini harus dengan peningkatan produksi. Karena itu, hitungan angka rata-rata statistik seperti GDP (Gross Domestic Product) dan GNP (Gross National Product) adalah persoalan penting; tanpa melihat orang-perorang, apakah mereka sejahtera atau tidak. Maka dalam pandangan neo-liberal harus ada liberalisasi perdagangan dalam bentuk pasar bebas. Kruman dan Obstfeld (2002), dalam M. Arif Adiningrat dan Farid Wadjdi, (2005) mengatakan bahwa agenda utama liberalisasi perdagangan adalah penghapusan hambatan non-tarif (proteksi) dan penurunan tarif perdagangan dalam transaksi perdagangan internasional. Tujuannya, masih menurut ekenom neo-liberal, untuk memacu semakin

meningkatnya volume perdagangan antarnegara di seluruh dunia. Mereka berharap, kalau volumenya bertambah akan menjadi motor penggerak bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan.

Liberalisasi juga menyerukan pemangkasan terhadap pengeluaran pemerintah. Menurut strategi neoliberal, seluruh kebijakan negara hanya ditujukan untuk melayani kepentingan perusahaan-perusahaan swasta, bukan melayani kepentingan publik yang tidak produktif. Karena itu anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya harus dihapuskan, karena sektor-sektor tersebut tidak dikategorikan sektor yang produktif. Bahkan, adanya anggaran untuk kepentingan publik menandakan negara telah ikut campur tangan dalam mekanisme pasar. Disamping pemangkasan anggaran publik, ekonomi neoliberal juga mengharuskan pemotongan-pemotongan subsidi bagi rakyat (Pontoh, 2003: 100-1001).

Liberalisasi diakui dalam Islam karena liberalisasi berarti adalah kebebasan manusia dalam beraktivitas. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an:

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١١﴾

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (QS. 13: 11).

Berbeda dengan pandangan Neoliberal kebebasan "*Private Property*" adalah menjadi absolut tanpa tanggung-jawab peran sosial apapun juga kecuali untuk akumulasi laba privat sebesar-besarnya. Kebebasan dalam konsep Islam sebagaimana yang dijelaskan Naqvi, (2003: 44) bahwa kebebasan individu dipakai sebagai sesuatu yang relatif karena kebebasan mutlak hanya milik Tuhan. Memang Tuhan menolak kebebasan individu yang bersifat mutlak:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴿٦﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَىٰ ﴿٧﴾

...”Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, Karena dia melihat dirinya serba cukup.”(QS. Al-‘Alaq: 6-7).

Naqvi (2003: 46-47) menjelaskan lebih lanjut bahwa konsep kehendak bebas mempunyai kaitan yang erat dengan tanggung jawab sosial. Islam menyeimbangkan antara kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial sehingga tidak ada lagi konflik maksimalisasi kesejahteraan individu dengan maksimalisasi kesejahteraan sosial sebagaimana yang ada pada paham neoliberal dimana maksimalisasi kesejahteraan individu tidak ada kaitannya dengan tanggung jawab sosial:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),

sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS. 3, 92)

Oleh karena Islam mengakui adanya liberalisasi dalam bidang ekonomi, maka menurut Ismail Yusanto (1998: 216-217) Islam membiarkan perdagangan berjalan secara wajar. Mekanisme penawaran dan permintaan akan menciptakan tata pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penetapan harga di atas keridhaan semua pihak. Negara mengawasi agar tidak terjadi praktek-praktek terlarang seperti penipuan, penimbunan, monopoli, kedzaliman dan sebagainya menetapkan harga. Terdapat riwayat, pernah orang-orang berseru kepada Rasulullah SAW. Menyangkut penetapan harga.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَائِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ. إِيَّيْ لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ".

" wahai Rasulullah SAW. harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami. Rasulullah SAW. lalu menjawab: "Allah yang sesungguhnya penentu harga, penahan, pembentang dan pemberi rizki. Aku berharap bertemu kepada Allah, tidak ada seorangpun yang meminta kepadaku tentang adanya kedzaliman dalam urusan darah dan unta" (HR. Ashabus Sunan). (Bey Arifin, 1992: 74)

Berkaitan dengan proteksi yang harus dihapus dalam agenda neoliberal, Manan juga sependapat bahwa kebijakan proteksi akan merintang alokasi sumberdaya yang paling efisien diseluruh dunia atau

menghalangi terjadinya perdagangan bebas, dia berkeyakinan bahwa tiap negeri akan menghasilkan barang yang diproduksi berdasarkan keuntungan alami dan keuntungan yang diperoleh, kemudian mereka menghasilkan barang ini lebih banyak dari pada yang diperlukan untuk keperluannya sendiri, dengan saling mengadakan pertukaran surplus barang yang kurang cocok dihasilkan negeri lain atau barang yang tidak diproduksinya sama sekali. Dalam hal ini Islam percaya akan inti dasar perdagangan bebas tentang biaya komparatif. Tetapi persoalannya adalah persaingan ini tidak seimbang. Dengan perbedaan struktur, perkembangan ekonomi, dan ketimpangan kemampuan sains dan teknologi, negara terbelakang tidak akan mampu bersaing melawan negara maju. Yang terjadi adalah dominasi negara-negara maju dalam perdagangan dunia yang membuat mereka semakin untung; negara terbelakang hanya jadi obyek dalam pasar bebas ini. Dalam hal ini Manan (1993: 294) mengatakan bahwa demi kepentingan Nasional kebijakan proteksi diperlukan dalam negara Islam. Proteksi dalam hal ini juga sesuai dengan aksioma etik Islam diatas tentang keseimbangan atau kesejajaran dalam prilaku ekonomi dimana Islam tidak menghendaki kekayaan hanya menumpuk pada orang atau negara kaya saja.

Sedangkan mengenai subsidi, Islam mempunyai prinsip politik ekonominya yaitu menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat,

adalah wajar bahkan wajib negara memberikan bantuan secara gratis kalau memang ada rakyat yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya. Adalah tanggung jawab negara juga menyediakan fasilitas kebutuhan kolektif masyarakat yang vital seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan keamanan secara murah. Karena itu, hasil tambang seperti minyak, emas, perak, dan lain-lain, memang milik umum (milkiyah 'âmah) dan digunakan untuk kepentingan rakyat. M. Arif Adiningrat dan Farid Wadjudi, (2005). Pendapat diatas juga senada dengan Naqvi, bahwa negara mempunyai peran penting dalam menjamin standar hidup minimum terhadap kalangan yang kurang beruntung dalam masyarakat. (2003: 94).

2. Deregulasi Perspektif Islam

Paham neoliberalisme percaya bahwa deregulasi sangat diperlukan demi berlangsungnya persaingan bebas dalam ekonomi. Keyakinan akan perlunya deregulasi ini diterapkan dengan mengurangi segala bentuk regulasi negara atau pemerintah terhadap usaha kebebasan ekonomi.

Deregulasi yang dicanangkan neoliberal adalah menunjuk pada kebijakan pemerintah yang mengurangi /meniadakan aturan administratif yang mengekang kebebasan gerak modal, barang, dan jasa. Dengan kebebasan gerak produksi, distribusi, dan konsumsi modal, barang, serta jasa itu, volume kegiatan bisnis swasta diharapkan melonjak.

Dengan kata lain deregulasi dalam kerangka neoliberal adalah menghapuskan peraturan-peraturan negara yang dapat mengurangi tingkat pengerukan keuntungan kaum kapitalis. Misalnya peraturan tentang lingkungan hidup, kesejahteraan buruh, keselamatan di tempat kerja dll.

Deregulasi dengan kata lain berarti **anti intervensi** pemerintah dalam perekonomian. Dalam pandangan Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Al-Faruq an-Nabahan (2000, 66), pemerintah harus bertanggung jawab atas anggotanya serta membahagiakan mereka dengan menghilangkan semua praktek yang mengancam kesejahteraan umum. Jadi Individu pemilik yang bermental egoistik yang mengancam pihak lain, pemerintah harus mengintervensi dan melarang operasional individu ini.

Pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan dengan berbagai cara yang semuanya mungkin tidak memenuhi keadilan distributif. Maka deregulasi yang dicanangkan oleh para neoliberal sesungguhnya bukan untuk mencapai keadilan distributif karena kebijakan ini hanyalah untuk melancarkan kaum kapitalis mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa ada regulasi apapun yang merintanginya. Maka dalam Islam, sebagaimana yang dikatakan Naqvi (2003: 150), kebijakan atau aturan/regulasi pemerintah diperlukan untuk menghilangkan munculnya

ketimpangan yang berlebih-lebihan dalam distribusi pendapatan karena dalam Islam pertumbuhan ekonomi tidak harus menyebabkan aliran sumber daya riil yang jahat dari orang miskin kepada orang kaya.

..... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴿٧٠﴾

“supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu”. (QS. 59, 7)

Dalam Islam negara mempunyai peranan yang penting dalam menjamin jaminan sosial bagi warga negaranya. Hadits Nabi mengatakan bahwa:

نَ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: مَا أُنْعَمْنَا بِكَ أَبَافِلَانِ، وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ، فَقُلْتُ: حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتْهُمْ وَفَقَّرَهُمْ اِحْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهُ وَفَقَّرَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

“bagi yang diberi amanah Allah menjadi penguasa atas urusan kaum muslimin tapi acuh tak acuh terhadap kebutuhan dan kemiskinan mereka, Allah pun akan acuh tak acuh terhadap kebutuhan dan kemiskinan (penguasa) itu” (HR. Imam Abu Daud) (Bey Arifin, 1992: 590).

Jadi pemerintah punya tugas bagaimana memihak masyarakat yang lemah bukan membela kepentingan kaum kapitalis yang hanya mementingkan dirinya sendiri dengan mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya dengan memberikan regulasi untuk kebebasan mereka.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Baqir al-Sdar dalam M.N. Siddiqi (1986: 43) negara mempunyai beberapa tugas, disamping

memberikan jaminan sosial , negara juga mempunyai tugas untuk menjamin pemenuhan kebutuhan untuk tiap warganegaranya serta menciptakan keseimbangan pada standar hidup dalam masyarakat. Tanggung jawab langsung terhadap jaminan sosial, didasarkan atas hak umum dari seluruh masyarakat terhadap sumber-sumber alam, dan karena adanya kenyataan, bahwa sebagian warga masyarakat yang tidak punya kemampuan untuk bekerja, juga punya hak terhadap sumber-sumber alam tersebut.

Tabel 5.1
Pertumbuhan Ekonomi dalam konsep Islam dan Neoliberalisme

	Konsep Islam	Konsep Neoliberalisme
Filsafat dasar pertumbuhan ekonomi	Konsep tauhid yang merupakan titik sentral etika Islam, yaitu menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Dengan nilai dasar <i>Tauhid, Rububiyah, Tazkiyah, Khilafah.</i>	Optimalisasi akan terjadi bila digerakkan oleh konsep ' <i>Homo Economics</i> ', yaitu barang atau jasa atau modal dimiliki dan dikuasai oleh orang-perorang yang akan menggerakkannya untuk tujuan akumulasi laba pribadi sebesar-besarnya
Fungsi kemaslahatan (utilitas)	Pembangunan ekonomi dalam Islam bukan hanya pembangunan material, tapi segi spritual dan moral pun mempunyai kedudukan yang sangat penting. Penekanan pertumbuhan	Pembangunan ekonomi hanya pembangunan material yaitu peningkatan GNP (pendapatan nasional kotor) merupakan satu-satunya ukuran

<p>Kebijakan Optimalisasi Pertumbuhan</p>	<p>hanya dari segi material tidaklah dapat menguasai luasnya kesenjangan dalam pembagian pendapatan karena dalam Islam yang ditekankan adalah keadilan distributif.</p> <p>Pertama, sepanjang kemajuan teknologi tergantung pada pendidikan dan kesehatan yang lebih tinggi – dalam pengembangan sumberdaya manusia – maka anggaran belanja untuk itu harus diperhatikan sungguh-sungguh. Kedua, semua kebijakan yang memperhitungkan bahaya kerusakan alam akibat pertumbuhan ekonomi harus diimplementasikan untuk mewujudkan keseimbangan yang lebih baik antara manusia dan alam.</p>	<p>“pertumbuhan ekonomi”</p> <p>Terletak pada persaingan bebas dengan kebijakan SAP dalam liberalisasi baik perdagangan maupun keuangan. Perlunya deregulasi untuk memperlancar persaingan bebas.</p>
<p>Peran Negara</p>	<p>pemerintah harus berusaha merencanakan serta memainkan peranan positif misalnya pemberantasan kemiskinan, menegakkan keadilan sosial dan ekonomi, mengatur keamanan, dll yang terkait dengan ekonomi</p>	<p>mekanisme pasar (<i>market mechanism</i>) sudah cukup untuk menggerakkan roda ekonomi, atau bahwa <i>invisible hand</i> cukup membuat lancar produksi, distribusi maupun konsumsi. Setiap campur negara hanya akan membuat distorsi.</p>

Sumber: data diolah

D. Relevansi Konsep Pembangunan Islam dalam Konteks Indonesia

Sejarah ekonomi bangsa selama masa penjajahan 3,5 abad menggambarkan eksploitasi sistem kapitalisme liberal atas ekonomi rakyat yang berakibat pada pemiskinan dan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat yang sangat pincang. Struktur sosial ekonomi yang tak berkeadilan sosial ini, melalui tekad luhur proklamasi kemerdekaan, hendak diubah menjadi masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Di Indonesia jika Pancasila kita terima sebagai ideologi bangsa maka sistem ekonomi nasional tentu mengacu pada Pancasila, baik secara utuh (gotong royong, kekeluargaan) maupun mengacu pada setiap Silanya:

1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa: Perilaku setiap warga Negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab: Ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan nasional;
3. Persatuan Indonesia: Nasionalisme ekonomi;

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan: Demokrasi Ekonomi;dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Desentralisasi dan Otonomi Daerah. (Mubyarto, 2002)

Dengan warisan sistem ekonomi dualistik dan sistem sosial-budaya pluralistik, bangsa Indonesia membangun melalui “eksperimen” sistem sosialis dan sistem kapitalis dalam suasana sistem ekonomi global yang bernaluri pemangsa (*predator*). Eksperimen pertama berupa sistem ekonomi sosialis (1959-66) gagal karena tidak sesuai dengan moral Pancasila dan pluralisme bangsa, sedangkan eksperimen kedua yang “demokratis” berdasar sistem kapitalisme pasar bebas (1966 - 1998) *kebablasan* karena paham internasional neoliberalisme makin agresif menguasai ekonomi Indonesia dalam semangat globalisasi yang garang. Krisis moneter yang menyerang ekonomi Indonesia tahun 1997 merontokkan sektor perbankan-modern yang keropos karena sektor yang kapitalistik ini terlalu mengandalkan pada modal asing. Utang-utang luar negeri yang makin besar, baik utang pemerintah maupun swasta, makin menyulitkan ekonomi Indonesia karena resep-resep penyehatan ekonomi dari ajaran ekonomi Neoklasik seperti Dana Moneter Internasional (IMF) telah melemahkan daya tahan ekonomi rakyat.

Dengan adanya Krisis Moneter ini, juga menciptakan suasana ketergantungan ekonomi Indonesia pada kekuatan kapitalis luar negeri, lebih-lebih melalui cara-cara pengobatan IMF yang tidak mempercayai serta mempertimbangkan kekuatan ekonomi rakyat dalam negeri khususnya di daerah-daerah. Kebijakan, program, dan teori-teori ekonomi yang menjadi dasar penyusunannya didasarkan pada model-model pembangunan neoliberalisme yang agresif tanpa mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat plural di Indonesia. Pakar-pakar ekonomi yang terlalu percaya pada model-model teoritik-abstrak, berpikir dan bekerja secara eksklusif tanpa merasa memerlukan bantuan pakar-pakar non-ekonomi seperti sosiologi, ilmu-ilmu budaya, dan etika. Strategi pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan makro dengan mengabaikan pemerataan dan keadilan telah secara rata-rata menaikkan peringkat ekonomi Indonesia dari negara miskin ke peringkat negara berpendapatan menengah, namun disertai distribusi pendapatan dan kekayaan yang timpang, dan kemiskinan yang luas.

Pada dasarnya kapitalisme dengan ideologi neoliberalisme-nya tidaklah mengalami kesulitan utama untuk terus mendesakkan kepentingan-kepentingan ekonominya. Sebab jika kita menyaksikan negara yang di isi oleh politisi-politisi kita sekarang, bukanlah berdiri secara diameter dan bertentangan dengan kepentingan kapitalisme,

melainkan justru para elite politik ini menjadi peserta aktif kebijakan modal, bahwa kinerja birokratisasi dan hukum dianggap sebagai gambaran dari keberadaan *nationstate* menjadi lemah itu disebabkan jabatan-jabatan publik yang dipikul oleh politisi bukan dijadikan praktik yang membawa amanat rayat, melainkan menjadi ajang negoisasi bisnis para politisi. Di sini negara kemudian mengalami disfungsionalisasi sebagai penjamin pelayanan publik dan semakin condong sebagai penjamin usaha bisnis. Ini bisa kita buktikan dalam berbagai kasus pemotongan subsidi, bahan bakar minyak, kesehatan, pendidikan, dsb., serta terbengkalainya agenda-agenda yang menyentuh hajat orang banyak, semakin menunjukkan bahwa perubahan yang diarahkan oleh kapitalisme global berakibat pada munculnya watak asosiasi negara di satu pihak dan watak komersial di pihak lain.

Padahal berdasarkan pasal 33 UUD 1945, GBHN menggariskan bahwa pembangunan di bidang ekonomi didasarkan pada demokrasi ekonomi dan karena itu masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya, dunia usaha perlu memberikan tanggapan yang positif melalui kegiatan yang nyata sesuai dengan usahanya. Sehingga dari

keduanya ada peran-peran ekonomi yang bersifat mutualistik dan saling mendukung. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dawam Rahardjo (1997) konsep SEP dapat ditafsirkan pada pasal 33 UUD 1945 yaitu bahwa demokrasi Ekonomi rumusannya adalah “produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan dan kepemilikan anggota-anggota masyarakat”, kemudian dijelaskan lagi keterangan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dengan tujuan “kemakmuran bagi semua orang”. Oleh karena itu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah (a) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (b) bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, yang merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; dan (c) hanya perusahaan yang tidak menguasai hidup orang banyak boleh ada ditangan-tangan orang-seorang (Ainur R. Shopiaan (ed), 1997, 113-114).

Sistem Ekonomi Pancasila diatas sebenarnya sesuai dengan konsep pembangunan Islam. Kalau kita kembali pada konsep Islam bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran penting dalam ekonomi Islam, sanksi Islam berlaku pada semua kebijakan pertumbuhan yang bisa mengakibatkan munculnya ketimpangan yang berlebihan dalam

distribusi pendapatan. Hal pokok yang perlu dicatat, dari sudut pandang Islam, pertumbuhan ekonomi tidak harus menyebabkan aliran sumber-sumber riil yang jahat dari orang miskin kepada orang kaya; pertumbuhan ekonomi tersebut juga tidak harus melanggar persyaratan-persyaratan kesejajaran antar generasi. Sebaliknya, kepentingan-kepentingan generasi mendatang harus diperhatikan. Konsep Islam ini sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.

Di Indonesia, meskipun Islam merupakan agama mayoritas, sistem ekonomi Islam secara penuh sulit diterapkan, tetapi Sistem Ekonomi Pancasila yang dapat mencakup warga non Islam kiranya dapat dikembangkan. Merujuk sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Sistem Ekonomi Pancasila menekankan pada *moral Pancasila* yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam. Tujuan Sistem Ekonomi Pancasila maupun sistem ekonomi Islam adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis.

Maka, sangat penting bagi pemerintah untuk kembali ke konstitusi yang diamanahkan kepada mereka yaitu pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat banyak untuk senantiasa menyadari fungsinya sebagai pemelihara urusan rakyat. Pemerintah harus menyadari

kewajibannya dalam memenuhi hak-hak minimum rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan jaminan hidup bagi rakyat tidak mampu. Investasi asing harus dicermati agar tidak sampai mengganggu pelayanan pemerintah pada sektor publik atau bahkan mengambil alih fungsi pemerintah dalam memenuhi hak-hak minimum rakyat. Investasi asing ataupun utang luar negeri yang masuk jangan selalu dianggap sebagai "penolong" yang bisa mengangkat taraf ekonomi rakyat, karena sering kali investasi asing, termasuk utang luar negeri, sengaja dijadikan kedok untuk selanjutnya menekan dan menguasai aset-aset yang dimiliki negara-negara berkembang. Melalui pengkajian ulang model pembangunan ekonomi neoliberal, Indonesia dapat menghindari proses imperialisme intelektual yang tanpa disadari telah mempertukarkan tiga setengah abad penjajahan fisik dengan tiga setengah dasawarsa penjajahan Neoliberal. Sungguh sulit membayangkan masa depan bangsa jika cendekiawan muda Indonesia tidak menyadarinya dan tidak mampu menyiasatinya.

Tabel 5.2
Beberapa Contoh Penerapan Sistem ekonomi Neoliberalisme yang
Didukung oleh Pemerintah Indonesia

Kebijakan	Pelaksanaan kebijakan
Liberalisasi pasar	Yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya dalam pertanian. Negara memilih kebijakan impor beras dari negara asing dengan dalih persediaan beras nasional tidak mencukupi, tetapi sebenarnya impor beras ini dilakukan agar beras-beras yang diproduksi oleh negara-negara lain dapat masuk ke Indonesia dan bersaing dengan beras nasional yang diproduksi oleh petani.
Regulasi investasi	Diterapkan oleh pemerintah sebenarnya untuk membuat investor nyaman berinvestasi seperti intensif pajak, membangun iklim investasi yang kondusif yang berarti keamanan yang terjamin, serikat buruh yang "ramah" serta sistem tenaga kerja yang fleksibel
Pencabutan subsidi	Pencabutan subsidi ini dilakukan agar perusahaan-perusahaan transnasional atau multinasional dapat bersaing dengan perusahaan negara. Contoh yang paling terlihat dampaknya adalah masuknya Perusahaan Shell dari Belanda dan Petronas dari Malaysia dalam bisnis penjualan bahan bakar untuk kendaraan. Bila subsidi untuk BBM tidak dicabut, maka harga-harga BBM akan tetap murah dan tentu saja perusahaan asing tersebut tidak dapat bersaing dengan harga yang diterapkan oleh pemerintah dengan adanya subsidi.
Utang Luar Negeri	Yang selama ini diterapkan oleh pemerintah ternyata telah menjadi alat untuk melemahkan dan membuat ketergantungan Indonesia kepada lembaga donor atau negara asing. Pembayaran utang tersebut tentu saja dibebankan kepada rakyat Indonesia dengan mewajibkan pembayaran pajak bagi rakyat Indonesia

Sumber: data diolah

BABVI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan neoliberal ada dua cara dalam rangka optimalisasi pertumbuhan ekonomi dalam tinjauan pendapatan yaitu; 1), Optimalisasi pertumbuhan ekonomi dapat dicapai sebagai hasil normal dari “kompetisi bebas” atau **liberalisasi**. 2), Pertumbuhan ekonomi akan optimal jika, dan hanya jika, lalu-lintas barang atau jasa atau modal tidak dikontrol regulasi apa pun atau disebut juga **deregulasi**.
2. Pandangan Islam terhadap kebijakan neoliberalisme dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi adalah :
 - a) Liberalisasi diakui dalam Islam karena liberalisasi berarti adalah kebebasan manusia dalam beraktivitas. Konsep kehendak bebas mempunyai kaitan yang erat dengan tanggung jawab sosial. Islam menyeimbangkan antara kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial oleh karena perbedaan struktur, perkembangan ekonomi, dan ketimpangan kemampuan sains dan teknologi, negara terbelakang tidak akan mampu bersaing melawan negara maju maka kebijakan proteksi diperlukan. Negara wajib

memberikan bantuan secara gratis kalau memang ada rakyat yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya.

- b) Deregulasi dengan kata lain berarti anti **intervensi pemerintah** dalam perekonomian. Dalam pandangan Islam kebijakan atau aturan/regulasi pemerintah diperlukan untuk menghilangkan munculnya ketimpangan yang berlebih-lebihan dalam distribusi pendapatan karena dalam Islam pertumbuhan ekonomi tidak harus menyebabkan aliran sumber daya riil yang jahat dari orang miskin kepada orang kaya. Maka dalam Islam pemerintah harus bertanggung jawab atas anggotanya serta membahagiakan mereka dengan menghilangkan semua praktek yang mengancam kesejahteraan umum. Jadi Individu pemilik yang bermental egoistik yang mengancam pihak lain, pemerintah harus mengintervensi dan melarang operasional individu ini.
3. Sejak Orde Baru Indonesia menganut sistem kapitalisme pasar bebas (1966 - 1998) paham internasional neoliberalisme ini makin agresif menguasai ekonomi Indonesia dalam semangat globalisasi yang garang. Krisis moneter yang menyerang ekonomi Indonesia tahun 1997 merontokkan sektor perbankan-modern yang keropos karena sektor yang kapitalistik ini terlalu mengandalkan pada modal asing. Utang-utang luar negeri yang makin besar, baik utang pemerintah maupun swasta, makin menyulitkan ekonomi Indonesia karena resep-resep

penyehatan ekonomi dari ajaran ekonomi neoliberal seperti Dana Moneter Internasional (IMF) tidak saja tidak menguatkan, tetapi justru melemahkan daya tahan ekonomi rakyat

Di Indonesia, meskipun Islam merupakan agama mayoritas, sistem ekonomi Islam secara penuh sulit diterapkan, tetapi Sistem Ekonomi Pancasila yang dapat mencakup warga non Islam kiranya dapat dikembangkan. Merujuk sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Sistem Ekonomi Pancasila menekankan pada *moral Pancasila* yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam. Tujuan Sistem Ekonomi Pancasila maupun sistem ekonomi Islam adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa saran yang perlu menjadi pertimbangan, baik pada aspek praktis yaitu pembangunan ekonomi Indonesia, maupun pada aspek konseptual, yaitu berkaitan dengan kepentingan bagi penelitian selanjutnya.

1. Saran praktis: Perlunya memikirkan kembali konsep sistem ekonomi yang selama ini dijalankan oleh pemerintahan Indonesia guna memperkuat fundamental perekonomian nasional terutama

masalah model pembangunan ekonomi yang selama ini telah dilaksanakan.

2. Saran konseptual : peneliti berharap agar pada penelitian berikutnya hendaknya agar memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut:
 - a) Lebih difokuskan dalam masalah penelitian sehingga hasil yang diperoleh lebih spesifik dan lebih konkret.
 - b) Lebih banyak mencari referensi terkait dengan neoliberalisme, ini dimaksudkan untuk bisa memahami neoliberalisme secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningrat, Arif dan Farid Wajdi *Analisis Ekonom: Ekonomi Islam vs Ekonomi Neo-Liberal*, 25/2/2004, <http://intra.bankriau.co.id/>
- Al Jawi, Muhammad Shiddiq (2005), *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Pasca Kapitalisme*, 25/2/2004, <http://www.e-syariah.net/artikel.asp?id=16>
- Alvi, Syafiq A. dan Amar al-Roubai, 2005, *Strategi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan (Dalam Persepsi Islam)*, Majalah ISLAMIA, THN II NO.5/ April-Juni 2005, 92
- an-Nabahan, M. al-Faruq, 2000, *Sistem Ekonomi Islam: Piulihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis*. Terjemahan H. Muhadi Zainuddin A. Baharudin dari *al-Iqtishad al-Aslami*, Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- Arifin, Bey, 1992, *Terjemahan Sunan Abu Daud*, jilid III, IV Penerbit CV. Asy Syifa', Semarang
- As'udi, M., 2001, *Relevansi Model-Model Penilaian dan Pengukuran Laba Akuntansi Konvensional Terhadap Akuntansi Syariah*, Skripsi FE UB, Malang
- Baswir, Revrison, *Bahaya Globalisasi Neoliberal*, 12/12/2003, [http://swaramuslim.on line](http://swaramuslim.online).
- _____, 2005, *Tim Ekuin 'Boediono'?* 06/12/2005 http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=224605&kat_id=15
- _____, 2006 *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Berger, Peter L., 2004, *Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan perubahan sosial*, Penerbit Pustaka LP3S Indonesia, Jakarta.
- Berita Resmi Statistik No. 47 / IX / 1 September 2006*
- Budiono, 1999, *Ekonomi Makro*, Cet. XIX, Penerbit BPFE, Yogyakarta.

- Chapra, Umer, 2000, *Islam dan Pembangunan ekonomi*. Terjemahan dari Ikhwan abidin Basri dari *Islam and Economic Development*, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta,
- Condro T, Dwi., 2005. *Bahaya Ekonomi Neo-liberal di Indonesia*, 2005/07/01 [http:// www.kapallaoet.blogspot.com](http://www.kapallaoet.blogspot.com)
- Evers, Hans-Dear, 1997, *Globalisasi dan Kebudayaan ekonomi Pasar*, Majalah Prisma, No. 5, Mei-Juni 2007, 80
- Fakih, Mansour, 2004. *Bebas Dari Neoliberalisme*, cet II, Penerbit INSIST Press, Yogyakarta.
- _____, 2002, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Penerbit INSIST PRESS, Yogyakarta
- Hadi, Kumala, 1997, *Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Irawan dan Suparmoko, 1999, *Ekonomika Pembangunan*, Cet. IX, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Jusuf, Eddy, 2007, *Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN* <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/032007/06/0901.htm>
- Keraf, A. Sonny, 1996, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Politik ekonomi Adam Smith*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,
- Majalah debtWATCH Indonesia, *Konspirasi Global: Kejahatan yang Terorganisir*, debtWATCH-INFO No. 04 - 2002.
- Manan, M.A., 1997, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Mander, Jerry, dkk, 2004, *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan*, Penerbit Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta.
- Moleong, L, J, 2000, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Penerbit PT Rosda Karya, Bandung.
- Mubyarto, 2002 *Penerapan Ajaran Ekonomi Islam Di Indonesia*, Artikel - Th. I - No. 2 - April 2002 www.ekonomirakyat.org

- Naqvi, Syed Nawab Haider, 2003, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian.*: Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Partanto, Pius A.,1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Penerbit ARKOLA, Surabaya
- Perkins, Jhon, 2005, *Confessions of an Economic Hit Man*, Penerbit Abdi Tandur, Jakarta
- Prayitno, H. dan Budi Santosa. 1996. *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta:
- Priyono, Herry, 2005, *Neoliberalisme*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0512/15/opini/2290496.htm>
- _____, 2005 *Filsafat Deregulasi* <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/01/opini/1789156.htm>
- Pontoh, Coen Husain, 2003, *Akhir Globalisasi: Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Massa*, Penerbit C-BOOKS, Jakarta
- Pontoh, Coen Husain, dkk., 2002, *Utang yang Memiskinkan*, Penerbit Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta
- Robinson, William I., 2003, *Hantu Neoliberalisme*, Penerbit C-BOOKS, Jakarta
- Rosyadi, Aan, 2001, *Analisa Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dalam Pembentukan Pasar Modal Islam (Studi Kualitatif Terhadap Konsep Perekonomian Islam Dalam Membentuk Perdagangan Surat Berharga di Pasar Modal)*, Skripsi FE UB, Malang.
- Saidi, Zaidi. 1998. *Soeharto Menjaring Matahari*. Bandung-Jakarta: Mizan bekerjasama dengan PIRAC.
- Samsul arifin, Moh., 2006, *Politik Utang Indonesia 16 januari 2006* http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/012006/16/teropong/lainnya_06.htm
- Sasono, Adi, dkk, 1998, *Solusi Islam Atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah)*, Gema Insani Press, Jakarta.

- Setowara, Subhan, 2005, *Studi Konsep Masalah Menurut Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan penerapan Syariat Islam di Indonesia*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam UMM Malang.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1986 *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*. Terjemahan Saifuddin, dkk., dari *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Penerbit LIPPM, Jakarta
- Soejono dan Abdurrahman, 2003, *metodologi Penelitian Hukum*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Sonhaji, Abdullah, dkk. 1993, *Sunan Ibnu Majah*, Penerbit CV. Asy Syifa', Semarang
- Sophiaan, Ainur R. (ed.), 1997, *Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis pembangunan Masyarakat Islam*. Penerbit Risalah Gusti, Surabaya.
- Sukirno, Sadono, 1978, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan*, Penerbit LPFE UI, Jakarta.
- Triatmojo, *Neoliberalisme*, 02/09/2006, [http:// triatmojo.wordpress.com/tag/politik/](http://triatmojo.wordpress.com/tag/politik/)
- Todaro, Michael P., 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Terjemahan Haris Munandar dari *Economic Development*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ulum, Ihyaul, 2002, *Tauhid Ekonomi: Melawan Arus Kapitalisme Global*, Jurnal Ilmiah Bestari, No. 34, Thn, XV, 2002, 23
- Wibowo, I, 2002, *Globalisasi dan Kapitalisme Global*, Kompas, sabtu 22 April 2002
- Wibowo, I dan Francis Wahono, 2004, *Neoliberalisme*, Penerbit Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta
- Winarno, Budi, 2004, *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru: Peran Negara Dalam Pembangunan*, Penerbit Tajidu Press, Yogyakarta
- Yusanto, Ismail, 1998, *Islam Ideologi: Refleksi Cendekiawan Muda*, Penerbit al-Izzah, Bangil Pasuruan.

Lampiran I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Gajayana No. 50 Malang, Telp. (0341) 551354; Fac. (0341) 572533 Pswt 126
 FE_UINMLG@Telkom.nete-mail:

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Ahmad Syuja'
 N I M : 02220058
 Minat : Manajemen Keuangan
 Judul Skripsi : *"Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Tinjauan Pendapatan Menurut Paham Neo-liberal (Kajian dalam Perspektif Islam)"*
 Dosen Pembimbing : Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si.

No	Tanggal	Materi	Tanda Tangan	
1	15-02-2007	Konsultasi Bab I, II, III	1	
2	25-02-2007	Revisi Bab I, II, III		2
3	07-03-2007	Acc Bab I, II, III	3	
4	10-03-2007	Konsultasi Bab IV, V		4
5	12-03-2007	Revisi Bab IV	5	
6	14-03-2007	Acc Bab IV		6
7	14-03-2007	Revisi Bab V	7	
8	14-03-2007	Acc Bab V		8
9	15-03-2007	Konsultasi Bab VI	9	
10	16-03-2007	Revisi Bab VI		10
11	17-03-2007	Acc Bab VI	11	

Malang, 16 Maret 2007

Mengetahui

D e k a n,

DRS. H. A. Muhtadi Ridwan, M.A.
 NIP. 150 231 828

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Ahmad Syuja'

NIM : 02220058

Alamat : Jl. R. Said No. 17, I/I, Ds. Takerharjo-Solokuro-Lamongan

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang, dengan judul

OPTIMALISASI PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PAHAM NEO-LIBERAL (Kajian Kritis Dalam Perspektif Islam)

Adalah hasil karya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 17 Maret 2007
Hormat saya,

AHMAD SYUJA'
NIM : 02220058